

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2025**



Disusun oleh :

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat dan PenyertaanNya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Timur dapat menyusun “RENCANA KERJA (RENJA) Tahun 2025”

Rencana Kerja (Renja) ini dapat dipakai sebagai pedoman/acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam satu tahun ke depan. Dalam Implementasinya tidak tertutup kemungkinan adanya penyesuaian-penyesuaian serta penyesuaian sesuai kedudukan dan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Berdasarkan ketentuan yang ada rancangan Renja Perangkat Daerah juga digunakan sebagai input/bahan masukan untuk penyusunan Rancangan RPJMD. Rancangan Renja ini diharapkan untuk mendukung tercapainya sasaran program dan kegiatan dapat lebih terkoordinasi, terarah dan berkelanjutan serta dapat lebih disenergikan dengan pihak-pihak terkait.

Selain itu, Renja ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Timur periode 2022-2026, dan dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Kabupaten Lampung Timur 2022-2026.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Kabupaten Lampung Timur periode 2022-2026 yaitu “Rakyat Lampung Timur Berjaya”

Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Renja termasuk indikator-indikator kinerjanya tanpa mengubah tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Timur periode 2022-2025.

Demikian terima kasih.

Sukadana, Oktober 2024

Plt.KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

RADEN BARUNA JAYA, S.H., M.M.
Penata Tk.I
NIP.19881222 201403 1 003

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD 2022..... 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD 6

2.2 Analisis Kinerja SKPD 18

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD 19

2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD 20

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 32

BAB III TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 34

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 34

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 37

3.2.1 Tujuan 37

3.2.2	Sasaran	
.....		38
3.3	Program	
dan Kegiatan		38
3.3.1. Program		38
3.3.2. Kegiatan		39
BAB IV PENUTUP		44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dengan mempertimbangkan urutan pilihan dan ketersediaan sumber daya. Sebagai salah satu dokumen perencanaan daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur disusun dengan memperhatikan kaidah tersebut di atas melalui penyusunan prioritas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Untuk menjamin keberlanjutan tersebut, rencana pembangunan Kabupaten Lampung Timur dituangkan dalam wujud dokumen perencanaan yang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam UU itu juga disebutkan bahwa Renstra OPD sebagai rencana 5 tahunan OPD, harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja OPD. Secara substansi, Renja OPD memuat evaluasi Renja OPD tahun sebelumnya, analisis terhadap evaluasi dan rancangan prioritas pembangunan, rencana kerja dan

pendanaannya, baik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini didasarkan pada struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, namun dengan tetap memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, permasalahan yang ada, dan isu strategis yang akan dihadapi.

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 dilaksanakan dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu *teknokratik*, *partisipatif*, *bottom-up* dan *top-down*. Hal ini dimaksudkan untuk menjaminterciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas baik antara usulan tingkat kecamatan, kegiatan yang disusun di tingkat dinas, kajian di tingkat Kabupaten, serta usulan dari para pemangku kepentingan lainnya baik itu yang diusulkan melalui APBD Kabupaten, usulan ke Provinsi maupun ketingkat pusat. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah dalam menyusun perencanaan pendapatan dan perencanaan belanja. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikut sertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur. Proses *bottom-up* dan *top-down* dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, hingga tingkat kabupaten melalui media musyawarah rencana pembangunan.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat Kabupaten Lampung Timur pada Era Desentralisasi, perlu disusun langkah-langkah perencanaan program pembangunan yang strategis, lebih fokus serta berdasarkan skala prioritas mengingat adanya keterbatasan anggaran, sumber daya tenaga dan sarana maupun prasarana.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 merupakan penjabaran dari rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2025.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Administratif II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Kinerja;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 70).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Lampung Timur tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
2. Sebagai acuan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan tahun 2025.
3. Sebagai acuan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan satu tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja
- 1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV : Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan.

Penyusunan renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya
- b. Tujuan yang dikehendaki
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya

d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah (PD) dan pencapaian perencanaan strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur sampai dengan tahun 2024 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD 2020 dan Pencapaian
Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2026 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	%	Rp. (000)	%
Belanja Langsung											
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran (bulan)										
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya tata persuratan dinas	12 bulan	50.000	12	4.998,00	12	7.000,00	12	100%	6.998,00	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi ,sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (belanja rekening telephon dan listrik)	12 bulan	180.000	12	28.763,50	12	96.000,00	12	100%	78.759,80	82%

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional	terpenuhinya belanja perizinan/pajak kendaraan Dinas roda 7 dan roda 2	12	bulan	50.000	12	4.109,00	12	10.000,00	12	100%	8.771,30	88%
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya tertib administrasi keuangan	12	bulan	1.125.000	12	173.750,00	12	34.776,00	12	100%	345.220,00	993%
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya belanja jasa petugas kebersihan halaman kantor dan gedung kantor	12	bulan	161.500	12	30.600,00	12	30.600,00	12	100%	30.600,00	100%
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	belanja servis peralatan kantor (pemeliharaan laptop,printer, AC)	12	bulan	125.000	12	7.200,00	12	10.000,00	12	100%	10.000,00	100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tercukupinya alat tulis kantor	12	bulan	175.000	12	22.500,00	12	21.609,00	12	100%	21.600,00	100%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya dokumen kantor	12	bulan	150.000	12	17.300,00	12	25.000,00	12	100%	25.000,00	100%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor	12	bulan	37.500	12	3.000,00	12	10.000,00	12	100%	10.000,00	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	12	bulan	37.500	12	4.500,00	12	5.000,00	12	100%	5.000,00	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersedianya bahan bacaan (Surat kabar harian dan mingguan)	12	bulan	180.000	12	27.500,00	12	10.000,00	12	75%	10.000,00	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya bahan logistik kantor (blj gula,kopi teh, air mineral selama 1 tahun)	12	bulan	75.000	12	7.235,00	12	10.000,00	12	100%	10.000,00	100%
Penyediaan Makanan dan minuman	Tercukupinya makan dan minum rapat	12	bulan	200.000	12	20.000,00	12	20.000,00	12	100%	2.000,00	10%
Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terwujudnya koordinasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan (Perjalan Dinas kedalam daerah dan luar daerah)	12	bulan	875.000	12	105.665,00	12	102.290,00	12	100%	102.290,00	100%

Penyediaan Jasa Pendukung administrasi/teknis perkantoran	tercukupinya pengelola administrasi/ Teknis perkantoran (2 org pengelola SIPKD,1 orang sopir, 1 org penjaga malam, 2 orang Pramusaji,1 orang kearsipan)	12	bulan	500.000	12	85.200,00	12	155.600,00	12	100%	155.600,00	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik (%)											
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas jabatan	12	bulan	50.000	0	-	0	35.000,00	0	100%	35.000,00	100%
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Jasa Servis,pergantian suku cadang dan BBM	12	bulan	750.000	12	141.900,00	12	48.050,00	12	100%	210.000,00	437%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya SDM aparatur											

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian aparaturnya DPMD	50	stel	115.200		-	-		60	100%	30.000,00	100%
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu (Baju khas Lampung)	50	stel	112.140		-	-		2	100%	1.650,00	100%
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu (%)											
Penyusunan Lapooran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan capaian kinerja	12	laporan	165.600	4		4	10.000,00	4	100%	5.723,00	57%
Penyusunan laporan keuangan semesteran	laporan keuangan	10	laporan	15.800	2	11.300,00	2	10.000,00	2	100%	10.000,00	100%
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	laporan keuangan	10	laporan	79.500			1	10.000,00	1	100%	4.302,00	43%

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	LkjIP	5	buah	100.000	1	15.000,00	2	10.000,00	2	100%	10.000,00	100%
Penyusunan perencanaan dan program	Renja, RKA, DPA	5	buah	625.000	1	30.400,00	9	36.200,00	3	33%	45.532,00	126%
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya SDM aparatur											
Pembinaan dan pengendalian alokasi dana desa (ADD)	monitoring dan evaluasi ADD	60	bulan	3.000.000	12	297.440,00	12	251.111,00	12	100%	250.111,00	100%
Pembinaan dan pengendalian dana pembangunan dana desa Alokasi APBN (DD)	Pengendalian dana desa alokasi APBN	12	bulan	3.750.000	12	348.997,00	12	292.920,00	12	100%	357.417,80	122%
Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Terselenggaranya Pelatihan TTG	200	orang	750.000	23	120.000,00	23	53.900,00	22	96%	53.900,00	100%

Revitalisasi lembaga adat daerah	Jumlah lembaga adat yang dibina	264	desa	200.000	75	73.000,00	75	205.450,00	24	32%	205.450,00	100%
Bimbingan teknis pengurus Tim Pengerak PKK Desa	Meningkatnya kinerja pengurus PKK Desa	1320	orang	2.500.000	100	96.000,00	100	55.800,00	100	100%	55.800,00	100%
Klinik Pendampingan / Konsultasi Desa (Mobile Clinic)	Terlaksananya pendampingan / konsultasi desa	264	desa	1.430.000	264	723.165,00	264	63.500,00	264	100%	59.080,00	93%
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Jumlah BUMDES (unit)											
Pembinaan dan fasilitasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	Terwujudnya Bumdes yang Maju dengan Manajemen Modern	264	desa	700.000	24	168.168,00	24	77.640,00	24	100%	77.220,00	99%
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Penggunaan dana desa sesuai aturan, panjang jalan desa yang terbangun, jumlah desa yang menggunakan e-budgetting, jumlah											

	posyantekdes yang terbentuk										
Evaluasi tingkat perkembangan desa	Tersedianya evaluasi tingkat perkembangan desa	264 desa	300.000	24	100.000,00	24	59.330,00	24	100%	59.330,00	100%
Expo Inovasi Pemberdayaan Desa	penilaian lomba desa	120 desa	2.500	24	231.950,00	24	180.070,00	24	100%	180.070,00	100%
Pelaksanaan bulan bkti gotong royong masyarakat (BBGRM)	peningkatan peran serta masyarakat dalam membangun desa secara partisipatif	264 desa	1.750.000	24	200.000,00	24	158.820,00	24	100%	158.820,00	100%
Revitalisasi Pokjanal posyandu	pokjanal posyandu desa dapat terbina	264 pokjanal	500.000	96	76.250,00	96	66.000,00	96	100%	65.000,00	98%
Gelar Teknologi Tepat Guna	Keikutsertaan Lampung Timur dalam kegiatan Gelar TTG tingkat Nasional	5 Event	1.500.000	1	93.250,00	1	147.000,00	1	100%	146.940,00	100%
Pendampingan Pelaksanaan Desa Saburai dan Gerbang Indah Bumi Tuah Bepadan	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	264 desa	300.000	264	186.400,00	264	77.960,00	264	100%	-	0%

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

	infrastruktur daerah pedesaan										
Program Peningkatan Tata Tertib Administrasi dan Kinerja Pemerintahan Desa											
Pelantikan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu	Pelaksanaan pelantikan Kepala desa PAW	5 kali	500.000	1	50.000,00	1	37.070,00	1	100%	-	0%
Monitoring Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)	Terlaksananya Monitoring Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	264 desa	150.000	264	69.775,00	264	42.812,00	264	100%	42.060,00	98%
Pembinaan Produk Hukum Peraturan Desa	Desa yang mampu menyusun Produk Hukum Peraturan Desa	264 desa	150.000	24	63.976,50	264	39.600,00	264	100%	39.102,00	99%
Fasilitasi Pembuatan Peta Batas Desa	Peta Desa se Kabupaten Lampung Timur	4 kecamatan	250.000	1	76.250,00	3	73.080,00	3	100%	71.880,00	98%

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa											
Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	APBDes yang dievaluasi sehingga sesuai dengan petunjuk	264 Desa	900.000	264	80.000,00	264	66.362,00	264	100%		0%
Evaluasi dan pendataan aset desa	Terdatanya Aset Desa	264 Desa	150.000	264	99.893,00	264	55.900,00	264	100%	55.539,82	99%
Fasilitasi dan Penguatan Sistem Keuangan Desa	Tersedianya fasilitasi dan siskeudes	40 Orang	125.000	0	91.630,00	40	76.220,00	40	100%	76.220,00	100%
Studi peningkatan kapasitas pengelola keuangan desa	Meningkatnya kinerja petugas siskeudes	264 Desa	2.000.000	0	65.400,00	20	74.420,00	20	100%	73.820,00	99%
Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Desa											
Pendampingan Pelaksanaan Pilkades Serentak	Terpilihnya Kepala desa definitif					152	348.592,00	152	100%	325.122,00	93%

Peresmian dan Pengambilan Sumpah Anggota BPD Se-Kabupaten Lampung Timur	Pelaksanaan Peresmian keanggotaan BPD PAW	2	kali	500.000	1	22.750,00	188	40.490,00	188	100%	40.490,00	100%
Pelatihan Managemen Pemerintahan Desa	Meningkatnya kinerja aparatur desa	264	desa	330.000	264	104.070,00	24	146.568,00	24	100%	146.268,00	100%
Pendayagunaan Profil Desa	Tersedianya profil desa	264	desa	900.000	264	29.900,00	264	70.080,00	264	100%	68.280,00	97%

2.2 Analisis Kinerja SKPD

Analisis kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari tahun berjalan 2025 dibandingkan dengan target RPJMD 2024 ditampilkan dalam bentuk tabel berikut di bawah ini :

PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	TARGET	REALISA SI	% REALISA SI	TARGET AKHIR RPJMD 2024	CAPAIAN s.d 2020 TERHADAP 2024 (%)
1	Penggunaan Dana Desa sesuai aturan (%)	100	100	90	90	100	90
2	Panjang jalan desa terbangun (m)	260.043	54.000	260.043	481,5611	270.000	178,35
3	Jumlah desa yang telah menggunakan e-budgetting (e village Budgetting) (desa)	264	2	264	100	100	100
4	Jumlah Posyantekdes yang terbentuk (unit)	23	5	23	1150	25	4600
5	Jumlah Posyantek yang terbentuk (unit)	23	2	23	460	10	4600
6	Jumlah BUMDes (unit)	7	5	6	21,42857	39	54,94
7	Jumlah desa yang memiliki DOKRENDES (unit)	264	264	264	100	264	100
8	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Infrastruktur Desa per Tahun (%)	60	100	75	75	100	75
9	Desa berprestasi (desa)	1	1	1	100	5	20
10	Kader Posyandu yang dibina (orang)	96	100	96	96	500	57,6
11	Cakupan kepala desa yang lulus pelatihan kepemimpinan (orang)	0	100	112	0	264	42,42
12	APBDes sesuai aturan (%)	100	100	100	100	100	100
13	KSP yang terbina (kelompok)	-	100	0	0	0	0

14	Pemilihan Kepala desa sesuai aturan (%)	100	100	100	100	100	100
15	BPD berfungsi sesuai aturan (%)	100	100	100	100	100	100
16	Penatausahaan keuangan desa sesuai aturan (%)	100	100	100	100	100	100

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Tema yang diambil dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 adalah Pemantapan Pembangunan Infrastruktur, Sumber Daya dan Ekonomi Kerakyatan untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Merata dengan beberapa sasaran pokok yaitu :

1. Memantapkan pembangunan infrastruktur dan kawasan strategis secara merata dan berkelanjutan untuk peningkatan daya saing, perekonomian dan pelayanan dasar
2. Memantapkan layanan pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan mandiri
3. Meningkatkan produksi, nilai tambah dan daya saing produk daerah untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan investasi dan pariwisata untuk mendorong pengembangan UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif berbasis potensi dan kearifan lokal
5. Memantapkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa untuk meningkatkan kemandirian, kesejahteraan dan ketentraman wilayah
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pro rakyat berlandaskan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjabaran RKPD tersebut, isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Lampung Timur untuk pembangunan tahun 2025 antara lain :

- a. Peningkatan sinergitas pembangunan antara desa dan kabupaten, diantaranya adalah pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa dan ketertiban, ketentraman serta perlindungan masyarakat.
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur desa
- c. Peningkatan pengelolaan keuangan desa
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah

2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD

Adapun perbandingan antara RKPD 2022 dengan rancangan awal usulan RKPD Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut :

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa			

	sa					sa			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa			4.299.996.281,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa			4.299.996.281,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	32.546.810,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	32.546.810,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lampung Timur, Sukadana	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	12.320.310,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lampung Timur, Sukadana	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	12.320.310,00

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

	na, Semua Kel/De sa					na, Semua Kel/De sa			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	7.226.500,0 0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	7.226.500,0 0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	-	-	13.000.000, 00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	-	-	13.000.000, 00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Kab. Lampu ng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/b ulan	3.537.662.5 49,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Kab. Lampu ng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/b ulan	3.537.662.5 49,00

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

ASN	Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa				ASN	Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa			
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.00 Dokume n	3.301.612.5 49,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.00 Dokume n	3.301.612.5 49,00
Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Ver ifikasi Keuangan SKPD	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokume n	118.200.000 ,00	Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Ver ifikasi Keuangan SKPD	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokume n	118.200.000 ,00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00 Laporan	95.680.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00 Laporan	95.680.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	9.400.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	9.400.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua	-	-	12.770.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua	-	-	12.770.000,00

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

	Kel/De sa					Kel/De sa			
Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13 Laporan	20.920.000, 00	Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13 Laporan	20.920.000, 00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	-	-	20.920.000, 00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	-	-	20.920.000, 00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan	Kab. Lampu ng Timur, Sukada	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	199.478.900 ,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan	Kab. Lampu ng Timur, Sukada	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	199.478.900 ,00

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

Bangunan Kantor	na, Semua Kel/De sa				Bangunan Kantor	na, Semua Kel/De sa			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.00 Paket	6.899.100,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.00 Paket	6.899.100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8.00 Paket	15.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8.00 Paket	15.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lampu ng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	4.821.200,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lampu ng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	4.821.200,00

	Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa					Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.00 Paket	57.665.200, 00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.00 Paket	57.665.200, 00
Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.00 Laporan	35.679.400, 00	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.00 Laporan	35.679.400, 00

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	-	-	79.414.000, 00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	-	-	79.414.000, 00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.00 Laporan	322.343.426 ,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.00 Laporan	322.343.426 ,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	5.000.000,0 0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	5.000.000,0 0

	Kel/De sa					Kel/De sa			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	25.015.658, 00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	25.015.658, 00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	-	-	292.327.768 ,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	-	-	292.327.768 ,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Kab. Lampu ng Timur, Sukada	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	8.00 Unit	187.044.596 ,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Kab. Lampu ng Timur, Sukada	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	8.00 Unit	187.044.596 ,00

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	na, Semua Kel/De sa	Pajaknya			dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	na, Semua Kel/De sa	Pajaknya		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15.00 Unit	177.044.596 ,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15.00 Unit	177.044.596 ,00
PROGRAM PENATAAN DESA	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	-	-	10.000.000, 00	PROGRAM PENATAAN DESA	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	-	-	10.000.000, 00

Penyelenggara an Penataan Desa	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	-	-	100.000.000 ,00	Penyelenggara an Penataan Desa	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	-	-	100.000.000 ,00
Pembentukan, Penghapusan, Penggabunga n, dan Perubahan Status Desa	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	12.00 Desa	100.000.000 ,00	Pembentukan, Penghapusan, Penggabunga n, dan Perubahan Status Desa	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	12.00 Desa	100.000.000 ,00
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	10.00 Desa	50.000.000, 00	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	10.00 Desa	50.000.000, 00

	Kel/De sa					Kel/De sa			
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH AN DESA	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	-	-	50.000.000, 00	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH AN DESA	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	-	-	50.000.000, 00
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara aan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	-	-	680.000.000 ,00	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara aan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	-	-	680.000.000 ,00
Fasilitasi Penyelenggara aan Administrasi Pemerintahan	Kab. Lampu ng Timur, Sukada	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	264.00 Dokume n	680.000.000 ,00	Fasilitasi Penyelenggara aan Administrasi Pemerintahan	Kab. Lampu ng Timur, Sukada	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	264.00 Dokume n	680.000.000 ,00

Desa	na, Semua Kel/De sa				Desa	na, Semua Kel/De sa			
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	264.00 Dokume n	100.000.000 ,00	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	264.00 Dokume n	100.000.000 ,00
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	264.00 Dokume n	100.000.000 ,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	264.00 Dokume n	100.000.000 ,00
Pembinaan dan Pemberdayaa	Kab. Lampu ng	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM	24.00 Dokume n	100.000.000 ,00	Pembinaan dan Pemberdayaa	Kab. Lampu ng	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM	24.00 Dokume n	100.000.000 ,00

n BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			n BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	88.00 Laporan	50.000.000,00	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	88.00 Laporan	50.000.000,00
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10.00 Laporan	30.000.000,00	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10.00 Laporan	30.000.000,00

Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	24.00 Dokume n	35.000.000, 00	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	24.00 Dokume n	35.000.000, 00
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	24.00 Dokume n	40.000.000, 00	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	24.00 Dokume n	40.000.000, 00
Fasilitasi Evaluasi Perkembanga n Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	25 Dokume n	50.000.000, 00	Fasilitasi Evaluasi Perkembanga n Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	25 Dokume n	50.000.000, 00

	Kel/De sa					Kel/De sa			
Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakata n yang Bergerak di Bidang Pemberdayaa n Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta serta Pemberdayaa n Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Ko	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	-	-	125.000.000 ,00	Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakata n yang Bergerak di Bidang Pemberdayaa n Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta serta Pemberdayaa n Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Ko	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	-	-	125.000.000 ,00

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

ta					ta				
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	24.00 Lembaga	1.250.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	24.00 Lembaga	1.250.000.000,00
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi	Kab. Lampung Timur, Sukadana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	24.00 Laporan	100.000.000,00	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi	Kab. Lampung Timur, Sukadana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	24.00 Laporan	100.000.000,00

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

Tepat Guna	na, Semua Kel/De sa				Tepat Guna	na, Semua Kel/De sa			
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	24 Laporan	75.000.000, 00	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	24 Laporan	75.000.000, 00
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggar aan Gerakan Pemberdayaa n Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	24.00 Dokume n	75.000.000, 00	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggar aan Gerakan Pemberdayaa n Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Lampu ng Timur, Sukada na, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	24.00 Dokume n	75.000.000, 00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun kedepan.

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025 sudah disesuaikan dengan usulan program dan kegiatan masyarakat sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan yang disusun dengan rencana pencapaian program daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan pembangunan infrastruktur dan kawasan strategis secara merata dan berkelanjutan untuk peningkatan daya saing, perekonomian dan pelayanan dasar
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan mandiri
3. Meningkatkan produksi, nilai tambah dan daya saing produk daerah untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan investasi dan pariwisata untuk pengembangan UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif berbasis potensi dan kearifan lokal
5. Memantapkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa untuk meningkatkan kemandirian, kesejahteraan dan ketentraman wilayah
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pro rakyat berlandaskan peraturan perundang-undangan.
7. Prioritas yang terkait tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah prioritas kelima yaitu Memantapkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan

desa untuk meningkatkan kemandirian, kesejahteraan dan ketentraman wilayah. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mendukung keseluruhan kegiatan prioritas lainnya dalam upaya peningkatan pelayanan diberbagai sektor pembangunan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam rangka menyelaraskan Program dan Kegiatan pembangunan antara pusat dengan daerah, program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur berdasarkan pula pada kebijakan dan program yang telah ditetapkan baik dalam surat keputusan menteri maupun berdasarkan Peraturan Menteri serta Kebijakan-kebijakan/Peraturan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menunjang ataupun yang menjadi skala prioritas kemajuan pembangunan di daerah ini diantaranya :

1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan. Kegiatan Perlombaan Desa Berprestasi dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan sangatlah penting dalam rangka Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa sehingga Desa dapat terlepas dari ketertinggalan.
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan. Kegiatan Penyusunan profil Desa sangatlah penting dilaksanakan guna untuk mendapatkan data yang akurat atau gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, kelembagaa,sarana dan prasarana serta kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong . Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong kita laksanakan dengan tujuan untuk mempertahankan semangat gotong royong masyarakat yang memang telah ada dari zaman nenek moyang kita dulu, namun apabila kegiatan ini tidak dilestarikan tidak menutup kemungkinan bahwa kegiatan gotong royong dalam masyarakat lama kelamaan akan punah, seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi yang semakin canggih. Kegiatan ini tetap mendapat porsi yang tidak kalah pentingnya dalam rangka mendukung arah RPJPD Kabupaten Lampung Timur yang Membangun Masyarakat Religius, berbudi luhur dan mendorong semangat kegotong royongan guna menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mendukung penegakan supremasi hukum, adapun bentuk dari kegiatan ini adalah Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat tingkat kabupaten.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Implementasi dari kegiatan ini adalah dengan membentuk Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan, yang ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kegiatan lain .
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam menumbuhkembangkan serta memberdayakan desa sebagai unit organisasi terdepan dalam melayani masyarakat, yang merupakan implementasi dari tertib aturan hukum dan kelembagaan serta tertib pelayanan publik, kepada Pemerintah desa diberikan Alokasi Dana Desa serta kegiatan Gerakan membangun (Gerbang Indah Bumi Tuah Bepadan) Lampung Timur yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, meningkatkan pengamalan

nilai-nilai keagamaan, sosial budaya, mendorong peningkatan perekonomian, keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, pada akhir tahun 2015 telah disahkan Perda Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata cara Pendirian, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDES serta sosialisasi Perda dimaksud di tahun 2016, untuk itu sangatlah perlu guna kesinambungan Program dan implementasi Permendesa Nomor 04 Tahun 2015 dan Perda Nomor 11 Tahun 2015 yang mengatur tentang Tatacara Pendirian, Pengelolaandan Pembubaran Bumdes , di Tahun Anggaran 2017 tertuang kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Tepat Guna, Upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka pengembangan Teknologi Tepat Guna yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 02 Tahun 2007 tentang pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi kelurahan yang diimplentasikan dengan kegiatan Rancangan Peraturan Daerah tentang tata cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Dusun.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa, yang diimplementasikan dengan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Kepala Desa.

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan pemantauan dan evaluasi Dana Desa
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor : 13 Tahun 2011 tentang Lembaga kemasyarakatan Desa dan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.322/26/SK/3012 tanggal 09 Mei 2012
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

3.2.1. TUJUAN

Tujuan dari dibuatnya Rencana Kerja ini adalah :

1. Memberikan arah kebijakan pembangunan dalam satu tahun
2. Memberikan jaminan pelaksanaan pembangunan sehingga perencanaan, tujuan dan sasaran sesuai dengan harapan, serta dapat memberikan umpan balik untuk perbaikan kebijakan dan program kedepan
3. Meningkatnya kinerja organisasi dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

3.2. 2. SASARAN

1. Tercapainya efisiensi dan efektifitas perencanaan DPMD
2. Tercapainya perencanaan program dan kegiatan yang inovatif
3. Sebagai bahan KUA dan PPAS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur

1.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1. PROGRAM

Prioritas Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025

adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penataan Desa
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum

3. 3. 2. KEGIATAN

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan penyusunan perubahan FPA - SKPD
- f. koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
- c. Pelaksanaan penatausahaan dan pengajuan/verifikasi keuangan SKPD
- d. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

- e. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
- f. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran

C. *Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*

- a. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
- b. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD

D. *Administrasi Umum Perangkat Daerah*

- a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- b. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- c. penyediaan bahan logistik kantor
- d. penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

E. *Penyediaan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah*

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

F. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- b. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

2. PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

A. PROGRAM PENATAAN DESA

- a. Penyelenggaraan penataan desa

- b. Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa
- c. Fasilitasi tata wilayah desa
- d. Fasilitasi penataan kewenangan desa
- e. Fasilitasi penamaan dan kode desa
- f. Fasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan kabupaten / Kota
- g. Fasilitasi sarana dan prasarana desa

3. PROGRAM ADMINSTRASI PEMERINTAHAN

A. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa

- a. Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
- b. Fasilitasi penyusunan produk hukum desa
- c. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa
- d. Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
- e. pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerjasama antar desa
- f. Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- g. Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
- h. Fasilitasi penyusunan Profil desa
- i. Fasilitasi pengelolaan aset desa
- j. Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

A. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah Kabupaten/ Kota serta pemeberdayaan

***masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya
hukum adat yang sama dengan daerah Kabupaten / Kota***

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT , RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat Desa / Kelurahan dan masyarakat hukum adat
- b. Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna
- c. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- d. Fasilitasi Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga

BAB IV

PENUTUP

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah Tahun 2025. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur, diharapkan dapat menjadi dasar dan pedoman guna melaksanakan Program/Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 ini disusun, besar harapan kami Program dan Kegiatan ini dapat berjalan sesuai rencana. Kami menyadari dalam penyusunan RENJA ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik untuk perbaikan, Terimakasih.

Sukadana, Oktober 2024

Plt. KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

RADEN BARUNA JAYA, S.H., M.M.

Penata Tk.I

NIP.19881222 201403 1 003

MATRIK RENCANA KERJA (RENJA) APBD TAHUN ANGGARAN 2026

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
						Tahun 2022		Tahun 2024		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2025			
						Target	Rp. (000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	(18)
Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)													
	Tertib administrasi dan peningkatan kinerja PD sesuai aturan	2 13 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah (LPPD,LKPJ,LKJIP)	1.288.214	100%	6.029.186	100%	6.029.186	100%	6.038.230	100%	6.060.269	100%	6.080.571	100%	6.112.069
	Renja, RKA, DPA	2.13.01.1.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja PD	4.781	100%	377.783	100%	377.783	100%	377.828	100%	378.383	100%	388.383	100%	388.383
	laporan capaian kinerja	2.13.01.1.01.06	koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar kinerja SKPD	Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja PD	10.500	100%	15.001	100%	15.001	100%	15.401	100%	15.440	100%	15.440	100%	16.440
		2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan capaian keuangan daerah													
		2.13.01.1.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	cakupan laporan keuangan yang dibuat sesuai aturan	2.146	100%	4.559.026	100%	4.559.026	100%	4.559.030	100%	4.559.050	100%	4.569.050	100%	4.578.950
Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023		2.13.01.1.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	cakupan laporan keuangan yang dibuat sesuai aturan	N/A	100%	150.000	100%	150.000	100%	153.000	100%	170.142	100%	170.142	100%	170.142

		2.13.01.1.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengajuan/verifikasi keuangan SKPD	Laporan keuangan yang dibuat sesuai aturan	N/A	100%	89.050	100%	89.050	100%	89.050	100%	89.150	100%	89.150	100%	89.150
		2.13.01.1.02.05	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Cakupan lapporan keuangan sesuai aturan	985.900	100%	10.050	100%	10.050	100%	10.490	100%	10.650	100%	10.650	100%	10.650
		2.13.01.1.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Laporan keuangan yang dibuat sesuai aturan	N/A	100%	8.900	100%	8.900	100%	8.931	100%	9.200	100%	9.200	100%	9.200
		2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah administarsi barang milik daerah pada perangkat daerah													
		2.13.01.1.03.06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tertib administrasi perkantoran dan laporan keuangan sesuai aturan	N/A	100%	23.000	100%	23.000	100%	23.500	100%	23.700	100%	23.700	100%	23.800
		2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran</i>	94.056												
		2.13.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tertib administrasi perkantoran dan laporan keuangan sesuai aturan	3.150	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.500	100%	20.700	100%	20.700	100%	20.800
		2.13.01.1.06.02	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tertib administrasi perkantoran dan laporan keuangan sesuai aturan	45.540	100%	18.000	100%	18.000	100%	18.500	100%	18.500	100%	18.500	100%	18.600
		2.13.01.1.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tertib administrasi perkantoran dan laporan keuangan sesuai aturan	3.000	100%	18.000	100%	18.000	100%	18.000	100%	18.339	100%	18.300	100%	18.400

		2.13.01.1.06.04	penyediaan bahan logistik kantor	Meningkatkan pelayanan administrasi umum perkantoran	3.300	100%	24.000	100%	24.000	100%	24.500	100%	24.700	100%	24.700	100%	24.900
		2.13.01.1.06.05	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatkan pelayanan administrasi umum perkantoran	11.599	100%	15.000	100%	15.000	100%	15.500	100%	15.700	100%	15.700	100%	15.800
		2.13.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang - undangan	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	4.920	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.400	100%	20.600	100%	20.600	100%	20.800
		2.13.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Meningkatkan pelayanan administrasi umum perkantoran	22.547	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.400	100%	100.648	100%	100.648	100%	101.648
		2.13.01.1.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah														
		2.13.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa penunjang administrasi perkantoran	17.827	100%	15.000	100%	15.000	100%	15.400	100%	15.600	100%	15.600	100%	15.800
		2.13.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	tersedianya jasa penunjang administrasi perkantoran	5.194	100%	30.000	100%	30.000	100%	30.300	100%	30.500	100%	30.500	100%	30.800
		2.13.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa penunjang administrasi perkantoran	58.390	100%	201.606	100%	201.606	100%	201.400	100%	201.806	100%	201.806	100%	211.806
		2.13.01.1.09	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawain perangkat daerah yang terpenuhi													

	terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	2.13.01.1.09.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	tersedianya pakaian dinas harian untuk pegawai PMD	N/A	100%	50.000	100%	50.000	100%	50.500	100%	50.700	100%	50.700	100%	51.700
		1.2.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	peningkatan SDM Pegawai DPMD	N/A	100%	60.000	100%	60.000	100%	60.300	100%	60.600	100%	60.600	100%	62.600
		2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah													
		2.13.01.1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya dan pajak kendaran perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Peralatan kendaraan dinas dalam kondisi baik	109.420	100%	137.000	100%	137.000	100%	137.300	100%	137.600	100%	137.600	100%	139.600
		2.13.01.1.09.06	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Peralatan kerja dan kendaraan dinas dalam kondisi baik	N/A	100%	15.000	100%	15.000	100%	15.200	100%	15.500	100%	15.500	100%	16.000
		01.1.09.03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung kantor tersedia	N/A	100%	72.770	100%	72.770	100%	72.800	100%	73.100	100%	73.402	100%	76.100
Memajukan desa	Meningkatnya fisik al Pemerintahan desa	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa terfasilitasi dalam penataan desa (%)		100%	150.000	100%	150.000	100%	150.225	100%	150.775	100%	152.164	100%	152.958
	tercapainya penataan desa	2.13.02.2.01.01	Penyelenggaraan penataan desa	Terfasilitasinya penyelenggaraan penataan desa	N/A	100%	30.000	100%	30.000	100%	30.005	100%	30.015	100%	30.946	100%	32.060
	tercapainya status desa yang jelas	2.13.02.2.01.02	Pembentukan , penghapusan , penggabungan , dan perubahan status desa	Terfasilitasinya penataan desa tersedianya data IDN	N/A	100%	30.000	100%	30.000	100%	30.050	100%	30.120	100%	30.128	100%	32.128
	terlaksananya	2.13.02.2.01.04	Fasiitasi tata wilayah desa	jumlah desa	N/A	100%	15.000	100%	15.000	100%	15.025	100%	15.100	100%	15.180	100%	21.180

	tata wilayah desa			terfasilitasi tata wilayah desa													
	terbentuknya kewenangan desa	2.13.02.2.01.07	Fasilitasi penataan kewenangan desa	persentase desa terfasilitasi dalam penataan desa	N/A	100%	25.000	100%	25.000	100%	25.050	100%	25.020	100%	25.120	100%	27.120
	setiap desa memiliki penamaan dan kode desa	2.13.02.2.01.08	Fasilitasi penamaan dan kode desa	jumlah desa terfasilitasinya penamaan dan kode desa	N/A	100%	15.000	100%	15.000	100%	15.020	100%	15.300	100%	15.320	100%	18.320
	telaksananya kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan	2.13.02.2.01.09	Fasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan kabupaten / Kota	jumlah desa terfasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum adat	N/A	100%	15.000	100%	15.000	100%	15.025	100%	15.200	100%	15.330	100%	18.330
	Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa	2.13.02.2.01.10	Fasilitasi sarana dan prasarana desa	jumlah desa terfasilitasi saran dan prasaran desa	N/A	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.050	100%	20.020	100%	20.140	100%	22.140
			PORGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase desa terfasilitasi dalam kerjasama antar desa (%)													
	Meningkatkan pendapatan asli desa	2.13.03	Persentase desa terfasilitasi dalam peningkatan kerjasama desa	Terfasilitasinya peningkatan kerjasama desa		100%	100.000	100%	125.000	100%	125.188	100%	125.644	100%	126.065	100%	126.718
	Lembaga ekonomi desa meningkat	2.13.03.2.01	Fasilitasi kerjasama antar desa dalam Kabupaten / Kota	Jumlah BUMdes bersama meningkat	N/A	100%	50.000	100%	50.000	100%	50.000	100%	50.112	100%	50.212	100%	50.212
	meningkatnya inpestor yang masuk di desa	2.13.03.2.02	Fasilitasi Kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten / Kota	terfasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga	N/A	100%	25.000	100%	50.000	100%	50.000	100%	50.047	100%	50.068	100%	50.068
	meningkatnya	2.13.03.2.03	Fasilitasi pembangunan	jumlah	N/A	100%	25.000	100%	25.000	100%	25.188	100%	25.485	100%	25.785	100%	26.438

	pembangunan kawasan perdesaan		kawasan perdesaan	pembangunan di kawasan perdesaaan													
			PROGRAM ADMINSTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa berpredikat desa maju (desa)(TPB)	199.388												
	administrasi pemerintahan desa yang sesuai dengan aturan	2.13.04.2.01	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Terfasilitasinya administrasi desa	199.388	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.003.000	100%	2.010.311	100%	2.017.045	100%	2.027.494
	peningkatan peran serta masyarakat dalam membangun desa secara partisipatif	2.13.04.2.01	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Terfasilitasinya administrasi desa	96.548	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.100	100%	151.000	100%	151.800
	Desa yang mampu menyusun Produk Hukum Peraturan Desa sesuai regulasi yang berlaku	2.13.04.2.01	Fasilitasi penyusunan produk hukum desa	Terfasilitasinya administrasi desa	49.659	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.001	100%	100.001	100%	100.603
	Pengendalian Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes)	2.13.04.2.01	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	jumlah desa terfasilitasi dalam perencanaan pembangunann desa	N/A	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	101.000	100%	101.000	100%	101.600
	Pengendalian dana desa alokasi APBN	2.13.04.2.01	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Terfasilitasinya administrasi desa	166.370	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.100	100%	150.710	100%	150.710
	Meningkatnya SDM aparatur pmerintahan desa	2.13.04.2.01	Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	jumlah desa berpredikat maju (desa) (TPB)	N/A	####	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.004	100%	151.000
	peningkatan	2.13.04.2.01	Fasilitasi penyelenggaran	jumlah desa	N/A	####	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	101.000	100%	102.000	100%	103.500

	peran serta masyarakat dalam membangun desa secara partisipatif		musyawarah desa	terfasilitasi dalam penyelenggaraan musyawarah desa													
	evaluasi dan pengawasan dalam penyusunan produk hukum desa	2.13.04.2.01	Evaluasi dan pengawasan peraturan desa	jumlah desa berpredikat maju (desa) (TPB)	N/A	####	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.100	100%	100.100	100%	100.600
	Jumlah BumDes yang Aktif dan sehat	2.13.04.2.01	pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerjasama antar desa	Terfasilitasinya pemerintahan desa	22.693	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.500	100%	101.000	100%	102.000	100%	102.300
	jumlah PAW kepala desa yang dapat di lantik	2.13.04.2.01	Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	Terfasilitasinya administrasi desa	N/A	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.500	100%	101.000	100%	102.000	100%	102.400
Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kompetensi aparatur desa	Pelaksanaan Peresmian keanggotaan BPD PAW	2.13.04.2.01	Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Terfasilitasinya administrasi pemerintahan desa	9.983	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.500	100%	101.000	100%	101000	100%	101.500
	Pendayagunaan Profil Desa	2.13.04.2.01	Fasilitasi penyusunan Profil desa	Terfasilitasinya administrasi pemerintahan desa	14.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.500	100%	101.000	100%	102.000	100%	102.571
	Meningkatnya kinerja aparatur desa	2.13.04.2.01	Fasilitasi manajemen pemerintahan desa	jumlah desa yang melaksanakan manajemen pemerintaha dengan baik	N/A	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.010	100%	100.510
	Terdatanya Aset Desa	2.13.04.2.01	Fasilitasi pengelolaan aset desa	Terfasilitasinya pembinaan dan pengawasan APD administrasi pemerintahan desa	14.998	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.010	100%	100.110	100%	100.500

	Jumlah anggota BPD yang memahami tugas pokok dan fungsinya	2.13.04.2.01	Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	jumlah SDM perangkat Desa dan lembaga desa yang memahami tugas dan fungsi pokok	N/A	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.500	100%	101.000	100%	101.010	100%	101.100
	Memiliki Peta Desa se Kabupaten Lampung Timur	2.13.04.2.01	Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	Jumlah desa yang memiliki peta desa dan batas desa	N/A	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.500	100%	101.000	100%	101.000	100%	101.600
	Terlaksananya Monitoring Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01	Fasilitasi pembinaan laporan Kepala Desa	jumlah desa berpredikat maju (desa) (TPB)	41.166	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	101.000	100%	102.000	100%	102.500
		2.13.04.2.01	pelaksanaan penugasan urusan / kewenangan Kabupaten / Kota yang dilaksanakan oleh desa	jumlah desa yang melaksnakan kewenangan kabupaten yang dilaksanakan oleh desa sesuai aturan	N/A	####	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	101.000	100%	101.000	100%	101.600
	Tersedianya evaluasi tingkat perkembangan desa	2.13.04.2.01	Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	jumlah desa berpredikat maju (desa) (TPB)	N/A	####	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.100	100%	151.100
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase aparaturnya desa dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdesa (%)													
	Meningkatnya kapasitas lembaga	2.13.05	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang		422.403	####	800.000	100%	800.000	100%	801.200	100%	804.124	100%	806.818	100%	810.998

	kemasyarakatan desa/kelurahan		pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah Kabupaten/ Kota serta pemeberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dengan daerah Kabupaten / Kota														
	cakupan jumlah kelompok adat yang diidentifikasi per kecamatan	2.13.05.2.01.01	identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat	persentase aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes(%)	N/A	####	50.000	100%	50.000	100%	50.050	100%	50.320	100%	50.520	100%	50.620
	Jumlah lembaga adat yang dibina	2.13.05.2.01	Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa / Kelurahan (RT , RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat Desa / Kelurahan dan masyarakat hukum adat	Jumlah Posyandu, LPMD dan Karang Taruna yang ditingkatkan kapasitas kelembagaanya	N/A	####	50.000	100%	50.000	100%	50.050	100%	50.400	100%	50.574	100%	50.774
	Jumlah lembaga adat yang dibina	2.13.05.2.01.03	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT , RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat Desa / Kelurahan dan masyarakat hukum adat	Terfasilitasinya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga dan masyarakat hukum adat	48.224	####	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.200

	peran serta lembaga masyarakat dalam pembangunan desa	2.13.05.2.01	Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan (RT , RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat Desa / Kelurahan dan masyarakat hukum adat	jumlah desa terfasilitasi sarana dan prasarana kelembagaan masyarakat	N/A	####	50.000	100%	50.000	100%	50.050	100%	50.104	100%	50.524	100%	50.924
	berkembangnya usaha ekonomi masyarakat desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	2.13.05.2.01	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	jumlah desa terfasilitasinya pengembangan usaha ekonomi masyarkat	N/A	####	50.000	100%	50.000	100%	51.000	100%	51.000	100%	51.500	100%	51.600
	Keikutsertaan Lampung Timur dalam kegiatan Gelar TTG tingkat Nasional	2.13.05.2.01.06	Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Terfasilitasinya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga dan masyarakat hukum adat	83.499	####	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.300	100%	150.900
	Terselenggaranya penilaian desa pelaksana terbaik Gotong Rorong Masyarakat	2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terfasilitasinya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga dan masyarakat hukum adat	39.448	####	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	150.300	100%	150.900
	terlaksananya ketentraman, ketertiban, dan perlindunagn masyarakat	2.13.05.2.01	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa	jumlah desa terfasilitasi ketentraman, ketertiban, dan perlindunagn masayarkat	N/A	####	50.000	100%	50.000	100%	50.050	100%	51.000	100%	51.500	100%	52.500

	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Terfasilitasinya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga dan masyarakat hukum adat	299.456	####	150.000	100%	150.000	100%	150.000	100%	151.300	100%	151.600	100%	152.580
	JUMLAH				1.910.005		9.079.186		9.104.186		9.117.843		9.151.123		9.182.663		9.230.237

Sukadana, Oktober 2024

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

RADEN BARUNA JAYA, S.H., M.M.

Penata Tk.I

NIP.19881222 201403 1 003

MATRIK RENJA APBD 2025

DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Urusan Pemerintah Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Pagu Anggaran 2025
1	2	
	PAGU OPD	32.165.542.376
1	URUSAN PILIHAN	30.012.311.054
1.01.	PERTANIAN	30.012.311.054
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.793.357.783
1.01.01.2-01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.000.000
1.01.01.2-01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000
1.01.01.2-01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000
1.01.01.2-01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000
1.01.01.2-01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000
1.01.01.2-02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.290.291.778
1.01.01.2-02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14.873.139.551
1.01.01.2-02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	7.000.000
1.01.01.2-02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	384.312.227

1.01.01.2-02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000
1.01.01.2-02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.920.000
1.01.01.2-02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.920.000
1.01.01.2-03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000
1.01.01.2-03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000
1.01.01.2-06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	136.819.300
1.01.01.2-06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000
1.01.01.2-06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000
1.01.01.2-06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	26.819.300
1.01.01.2-06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000
1.01.01.2-08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.732.786.205
1.01.01.2-08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	92.286.205
1.01.01.2-08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000
1.01.01.2-08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.630.500.000
1.01.01.2-09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	568.460.500

1.01.01.2-09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	536.760.500
1.01.01.2-09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000
1.01.01.2-09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.200.000
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	9.808.418.311
3.27.02.0.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	9.808.418.311
3.27.02.0.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	8.075.481.606
3.27.02.0.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.732.936.705
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.434.177.779
3.27.03.201	Pengembangan Prasarana Pertanian	1.234.141.394
3.27.03.201.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	34.653.174
3.27.03.201.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	1.199.488.220
3.27.03.202	Pembangunan Prasarana Pertanian	200.036.385
3.27.03.202.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	26.456.344
3.27.03.202.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	124.810.375
3.27.03.202.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	23.769.666
3.27.03.202.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	25.000.000

3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	303.590.341
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	303.590.341
3.27.05.2.01.0001	Pengendalin Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	76.567.569
3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	74.151.250
3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	89.859.600
3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	63.011.922
3.27.06	PROGAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	20.234.256
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.234.256
3.27.06.201.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	10.000.000
3.27.06.201.0005	Pembinaan dan pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	10.234.256
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	652.532.584
3.27.07.201	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	652.532.584
3.27.07.202	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	466.588.957
3.27.07.203	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	165.000.000
3.27.07.204	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	7.368.627
3.27.07.205	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	13.575.000

2	URUSAN WAJIB	2.153.231.322
2.09.	PANGAN	2.153.231.322
2.09.02	<i>PROGAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK</i>	20.509.542
2.09.02.2.01	Penyediaan Insfrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20.509.542
2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastuktur Pedukung Kemandirian Pangan Lainnya	20.509.542
2.09.03	<i>PROGAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHAN PANGAN MASYARAKAT</i>	1.588.950.326
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.070.979.733
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sikronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	40.419.733
2.09.03.2.01.0020	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	1.030.560.000
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi PanganPerkapita/Tahun sesuai dengan Angka KecukupanGizi	517.970.593
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	26.645.000
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	491.325.593

2.09.04	PROGAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	304.355.032
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	10.000.000
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhirar dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	10.000.000
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/kota	294.355.032
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	294.355.032
2.09.05	PROGAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	239.416.422
2.09.05.2.01	Pelaksana Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	239.416.422
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	239.416.422

Mengetahui,
Plt. Kepala Dinas



Tri Wibowo, S.STP., M.M.
NIP. 19850924 200412 1 002



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) PERUBAHAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Taufik Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 dengan baik. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 ini atas dasar Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Apabila dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 ini terdapat kekurangan, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan Rencana Kerja ini.

Sukadana, 15 Juni 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



MARSAN, S.Pd.Ing, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 19680610 199203 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	3
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Sistematika Penulisan	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD	
	TAHUN LALU	6
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra	6
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan PD	10
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	14
2.4	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	15
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	36
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	39
3.1	Telahaan terhadap Kebijakan Nasional	39
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja PD	42
3.3	Program dan Kegiatan	43
BAB IV	PENUTUP	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan pasal 5 ayat (3) Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.1.1. Pengertian Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dimaksud **Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.**

Sebagai tindaklanjut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 di atas, dan lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 dan RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun Renja-SKPD memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja Dinas Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 138 :

(1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2);

(2) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKP;

(3) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129.

Penyusunan Renja Perumahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan tahapan persiapan Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah kemudian Penetapan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down process*.

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJP nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJM provinsi. Sedangkan RPJMD kota mengacu pada RPJM nasional. RPJMD kabupaten dijabarkan oleh Badan Perencanaan Daerah dalam bentuk RKPD. RKPD ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD. Dari Rancangan APBD akan disahkan untuk menjadi APBD. RPJMD kabupaten ini menjadi pedoman dalam penyusunan renstra SKPD. Selanjutnya renstra akan dijadikan pedoman dalam penyusunan renja SKPD. Renja SKPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA. RKA dan APBD akan dijabarkan dalam rincian APBD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. Permendagri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur 2005 – 2025;

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur 2021– 2026

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur dengan dukungan pendanaan dari APBD Kabupaten Lampung Timur dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Adapun tujuan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 untuk menyusun rancangan awal yang berfungsi sebagai perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan dalam kurun waktu 1 tahun diantaranya:

1. Mendeskripsikan tentang program-program serta kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur sehingga program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.
2. Merumuskan visi, misi, tujuan dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan kedinasan yang dijabarkan dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026.
3. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan yang berorientasi pada hasil.
4. Menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan Arah Kebijakan Umum dan program pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Timur dengan kewenangan Dinas sebagai dasar Perencanaan program jangka menengah dan tahunan serta Perencanaan kebutuhan anggaran.
5. Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja Dinas dan jajarannya secara seimbang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 ini adalah:

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika penulisan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran renja PD
- 3.3. Program dan kegiatan

Bab IV. Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2024 dan
CAPAIAN RENSTRA PD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dan Capaian Renstra PD

Rencana kerja yang ditetapkan pada tahun 2024 telah dilaksanakan secara baik. Dengan total 8 program 19 kegiatan dan 92 sub kegiatan yang dilaksanakan dengan total anggaran sebesar **Rp.848.251.137.575,-** dan penyerapan anggaran sebesar **Rp. 810.275.765.952,-** atau **95,52 %**. Secara umum semua kegiatan berjalan lancar.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD merupakan kegiatan lanjutan dari pengukuran pencapaian sasaran, maka evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja dilaksanakan berpedoman pada ukuran-ukuran atau indikator yang telah ditetapkan. Untuk Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Timur merencanakan program dan Kegiatan serta jumlah Anggaran sebagai berikut :

- Jumlah Program : 8 Program
- Jumlah Kegiatan : 19 Kegiatan
- Jumlah Sub Kegiatan : 92 Sub Kegiatan
- Rencana Anggaran : Rp. **848.251.137.575,-** terdiri dari :
 - a. Belanja Operasional : Rp. 747.564.295.826,-
 - a. Belanja Modal : Rp. 100.675.837.150,-

Dari Rencana Kerja tersebut, pada akhir tahun 2024 pelaksanaan Program dan Kegiatan beserta anggaran terealisasi sebagai berikut :

- Jumlah Program : 8 Program atau 87,5 %
- Jumlah Kegiatan : 19 Kegiatan atau 94,4 %
- Jumlah Sub Kegiatan : 92 Sub Kegiatan atau 96,15%
- Jumlah Realisasi : **Rp. 810.286.761.551,-** atau **95,52 %** dari Rencana Anggaran Tahun 2024 dengan rincian :
 - a. Belanja Operasional : Rp. 712.625.593.885,- atau 95,23 %
 - b. Belanja Modal : Rp. 97.650.163.067,- atau 96,99 %

Secara rinci evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2024 serta Realisasi Program dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.
Realisasi Anggaran per Program Tahun 2024

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	552.696.853.537	521.622.108.589	94,38
B. Program Pengelolaan Pendidikan	148.707.823.186	145.299.595.981	97,65
C. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	24.252.800.000	24.166.092.895	99,64
D. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	68.260.400	66.485.400	97,40
E. Program Pengembangan Kebudayaan	1.154.384.112	1.033.599.240	89,54
F. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	962.206.600	793.455.255	82,46
G. Program Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya	282.294.288	123.125.683	43,62
H. Program Pembinaan Sejarah	82.000.000	46.231.000	56,38
JUMLAH	848.251.137.575	810.275.756.952	95,52

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Lampung Timur

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Targe t Renja Peran gkat Daera h Tahu n 2023	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2023	Tin gk at Re ali sas i (%)		Realis asi Capai an Progr am dan Kegiat an s/d tahun 2024	Tingk at Capai an Realis asi Targe t Renst ra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/ 5)	8	9=(4+ 6+8)	10=(9/ 3)
Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
Bidang Urusan Pendidikan									
Program Pengelolaan Pendidikan	APK Paud	100	90,6	97	88,08	90, 80	97	275,6 8	275,6 8
	APK SD	100	103	100	102,09	10 2,0 9	100	305,0 9	305
	APK SMP	99	98	97	94,18	97, 09	97	289,1 8	292
	APM SD	100	98,25	100	98,34	98, 34	100	296,5 9	296,6
	APM SMP	100	89,19	78	86,31	11 0	78	305,0 9	305,0 9
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang terakreditas i	98,7	97,20	98,25	97,74	99, 48	98,25	293,1 9	297
	Persentase Kondisi ruang kelas dan sarana	85	70	75	50	66, 67	75	195	229

	prasarana yang baik								
	Persentase Tenaga Pendidik dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	100	87	100	100	100	100	287	287
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Menengah	Persentase SMP yang terakreditasi	98,5	90,86	97,25	91,93	94,53	97,25	280,04	284
	Persentase Kondisi ruang kelas dan sarana prasarana yang baik	90	74	75	65	86,67	75	214	237
	Persentase Tenaga Pendidik dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	100	90	100	100	100	100	290	290
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Paud	Persentase sekolah PAUD yang terakreditasi	99	95,85	98,7	98,61	99,91	98,7	293,16	296
	Persentase Tenaga Pendidik dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	90	60	75	60,69	80,92	75	195	217
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan	Persentase sekolah Kesetaraan yang terakreditasi	100	100	100	100	100	100	300	300
	Persentase Tenaga Pendidik dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	100	100	100	100	100	100	300	300
Program Pendidikdan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru PNS yang bersertifikasi								
Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Guru PNS yang bersertifikasi	90	60	80	61,33	76,66	80	201	223
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Cakupan penyelenggaraanpendidikan oleh masyarakat								

	yang berizin								
Kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase meningkatn ya jumlah perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggar akan oleh masyarakat	4	0	2	2	100	2	4	100
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
Bidang Urusan Kebudayaan									
Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah warisan budaya benda dan tak benda yang dilestarikan dan diregistrasi								
Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warisan budaya tak benda yang diregistrasi dan legalisasi pokok pikiran kebudayaan daerah	4	2	2	0	0	2	4	100
Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelestarian pemajuan tradisi budaya	40	30	35	30	85,71	35	95	225
Program Pengembangan KesenianTradisional	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pen dukung pertunjukan seni								
Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatn ya peserta pelatihan dan pertunjukan kesenian tradisional di lingkungan sekolah	500	100	200	200	100	200	500	100
Program Pembinaan Sejarah	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang mengunjun gi peninggalan sejarah								

Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya database tentang data informasi sejarah dan budaya di Kab. Lampung Timur	1	0	1	0	0	1	1	100
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi								
Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	3	2	2	2	100	2	6	200

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini akan menguraikan sejauh mana keberhasilan OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya atau sejauhmana kinerja OPD berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Sasaran 1 : “Meningkatnya Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan”

Tolok ukur capaian sasaran strategis Meningkatnya kualitas dan akses layanan pendidikan diukur dengan 9 (sembilan) indikator . Indikator tersebut adalah : APK Paud, APK SD/ sederajat/ APK SMP/ sederajat, APM SD/ sederajat, APM SMP/ sederajat, Kemampuan Literasi SD, Kemampuan Literasi SMP, Kemampuan Numerasi SD dan Kemampuan Numerasi SMP.

Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya kualitas dan akses layanan pendidikan :

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)
			Target	Realisasi	Persentase Realisasi	
1	APK Paud	88,08	97,50	93,24	95,63 %	98,50
2	APK SD	102,24	104	99,93	96,09 %	105
3	APK SMP	97,92	98	101,87	103,95 %	99
4	APM SD	97,98	100	96,26	96,26 %	100
5	APM SMP	88,59	92	86,92	94,48 %	93
6	Kemampuan Literasi SD	51,96	53,30	59,56	111,74 %	70
7	Kemampuan Literasi SMP	64,69	66,66	66,28	99,43 %	80
8	Kemampuan Numerasi SD	41,20	39,24	50,28	128,1 %	50
9	Kemampuan Numerasi SMP	58,48	63,02	62,50	99,17 %	70

Nilai realisasi rerata untuk Sasaran 1 ini sudah mendekati target, untuk persentase realisasinya sudah diatas 90% bahkan ada yang melampaui target bahkan ada yang melampaui target walaupun indikator kualitas pendidikannya masih di bawah 90 % namun setiap tahunnya selalu meningkat. Untuk capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas dan akses layanan pendidikan dapat disimpulkan “berhasil” karena capaian indikatornya rata-rata diatas 90%. Beberapa program yang mendukung capaian ini yaitu sebagaimana tabel Program, Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Triwulan IV		Program	Pagu (Rp)	Triwulan IV	
			Realisasi	Persen			Realisasi (Rp)	Persen
Meningkatnya kualitas dan akses layanan pendidikan	APK Paud	97,50	93,24	95,63	Pengelolaan Pendidikan	268.752.368.638	262.424.658.890	97,65
	APK SD	104	99,93	96,09	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	24.252.800.000	24.166.092.895	99,64
	APK SMP	98	101,87	103,95				
	APM SD	100	96,26	96,26				
	APM SMP	92	86,92	94,48				
	Kemampuan Literasi SD	53,30	59,56	111,74				
	Kemampuan Literasi SMP	66,66	66,28	99,43				
	Kemampuan Numerasi SD	39,24	50,28	128,1				
	Kemampuan Numerasi SMP	63,02	62,50	99,17				

Kegiatan utama yang mendukung capaian sasaran tersebut adalah Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan Sub kegiatannya antara lain :

1. Penambahan ruang kelas baru
2. Pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah
3. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas
4. Pengadaan mebel sekolah
5. Pengadaan perlengkapan sekolah
6. Penyediaan biaya personil peserta didik
7. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
8. Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik
9. Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa

10. Pengembangan karir pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan
11. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah
12. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
13. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
14. Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS
15. Pengelolaan Dana BOS
16. Pengelolaan Dana BOP
17. Penyediaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
18. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
19. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
20. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
21. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

Sasaran 2 : “Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya Daerah”

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatkan pelestarian warisan budaya daerah diukur dengan 1 (satu) indikator . Indikator tersebut adalah : Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya

Target dan Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya :

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026 (%)
			Target	Realisasi	Persentase Realisasi		
1	Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	84	70	70	100 %	80	80 %

Nilai realisasi untuk Sasaran strategis 2 ini sudah mencapai 100 % dari target yang ditentukan. Salah satu upaya yang telah berhasil untuk melestarikan warisan budaya daerah diantaranya adalah dengan telah ditetapkannya Ketaro Adat dan Mewaghi sebagai warisan budaya tak benda Kabupaten Lampung Timur oleh Pemerintah Pusat pada Tahun 2021 dan Tahun 2024 juga Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah merekomendasikan Penetapan dan Pemeringkatan Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten 3 (tiga) Objek yaitu :

- Kantor POS Sukadana
- SMPN 1 Sukadana
- Lokasi dan Sisa Struktur Bangunan Rumah Tinggal serta benda-benda peninggalan K.H. Ahmad Hanafiah

Dengan capaian di atas, diharapkan peninggalan warisan budaya benda dan tak benda di Kabupaten Lampung Timur diakui oleh Pemerintah dan dijaga serta dilestarikan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Program yang mendukung capaian ini yaitu sebagaimana tabel Program, target dan realisasi anggaran Tahun 2024 berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Triwulan IV		Program	Pagu (Rp)	Triwulan IV	
			Realisasi	Persentase			Realisasi (Rp)	Persentase
Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya Daerah	Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	70	70	100	Pengembangan Kebudayaan	1.154.384.112	1.033.599.240	89,54
					Program Pengembangan Kesenian Tradisional	962.206.600	793.455.255	82,46
					Program Pembinaan Sejarah	82.000.000	46.231.000	56,38
					Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	282.294.288	123.125.683	43,62

Kegiatan utama yang mendukung capaian sasaran tersebut adalah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Pemeringkatan Kabupaten/Kota, Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dengan sub kegiatannya antara lain :

1. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatn Objek Pemajuan Kebudayaan
2. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan tradisi Budaya
3. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
4. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
5. Pengembangan Cagar Budaya
6. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Meskipun secara umum capaian kinerja sasaran ialah Berhasil, akan tetapi secara indikator sasaran khususnya ada capaian angka partisipasi kasar (APK) Paud dan SMP serta Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SMP belum memenuhi target 100%. Hal ini terjadi karena semakin meratanya mutu Pendidikan di Kabupaten lain di luar Lampung Timur seperti pesatnya perkembangan sekolah swasta di Kabupaten/Kota lain yang berdekatan dengan Kabupaten Lampung Timur.

Penyebab lainnya itu untuk angka partisipasi sekolah (APS), meskipun capaiannya di Tahun 2023 adalah 93,39 %, akan tetapi belum berada pada kondisi yang ideal, menunjukkan bahwa kesadaran warga Kabupaten Lampung Timur usia sekolah sebagian besar sudah mengakses sistem Pendidikan di Kabupaten Lampung Timur. Masih terdapat berbagai faktor yang menyebabkan anak putus sekolah seperti faktor pembiayaan, faktor sosial budaya dan faktor anak berkebutuhan khusus. Namun berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan menyebabkan anak putus sekolah ialah faktor sosial di keluarga dan lingkungan masyarakat. Anak-anak yang putus sekolah sebagian berasal dari keluarga yang bermasalah dan lingkungan masyarakat yang tidak mendukung untuk tumbuh kembang anak. Selain itu juga kualitas pendidikan di Kabupaten Lampung Timur yang masih dalam kategori sedang, hal ini dapat dilihat dari capaian kemampuan literasi dan numerasi.

Untuk urusan kebudayaan, saat ini Pemerintah Daerah masih kesulitan memperoleh data mengenai jenis, jumlah dan atau lokasi peninggalan budaya di Kabupaten Lampung Timur baik budaya benda dan budaya tak bendanya. Pengetahuan masyarakat akan seni, budaya dan cagar budaya di Kabupaten Lampung Timur ini juga sangat minim. Begitu juga kesadaran masyarakat akan menjaga kelestarian budaya masih kurang karena minimnya pengetahuan tadi.

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu sebagai daya tarik bagi calon peserta didik
2. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan melalui kegiatan pelatihan, workshop peningkatan kompetensi dan fasilitasi komunitas tenaga pendidik
3. Kerjasama dengan sekolah swasta dan untuk meningkatkan APK APM
4. Pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu

5. Perbaikan data khususnya data kewilayahan, dengan memanfaatkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi untuk memfasilitasi penduduk usia sekolah yang berkebutuhan khusus
7. Optimalisasi SKB dan PKBM untuk penanganan anak putus sekolah
8. Menghimbau kepada satuan Pendidikan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan wali murid, minimal ada pertemuan sekali dalam 1 semester dengan wali murid dengan untuk mengingatkan pentingnya pendidikan dan menguatkan ilmu parenting
9. Melakukan verifikasi data yang kebudayaan yang ada dan memperbaiki data kebudayaan dalam aplikasi Dapobud
10. Melakukan pendataan terhadap objek yang di duga cagar budaya, manuskrip dan peninggalan kebudayaan lainnya di Kabupaten Lampung Timur
11. Melaksanakan berbagai event bercorak seni dan budaya mulai dari tingkat kecamatan sampai kabupaten sebagai salah satu sarana untuk mempromosikan dan melestarikan budaya

Dengan dilakukannya langkah-langkah perbaikan diatas, diharapkan kedepannya akan berdampak pada tercapainya semua sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja maupun Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Renja tahun 2025 sudah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang didasarkan pada program yang telah disesuaikan berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.

Berdasarkan analisis tersebut maka ditetapkan program rancangan awal rencana kerja yang meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
5. Program Pengembangan Budaya
6. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
7. Program Pembinaan Sejarah
8. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Adapun Review terhadap Rancangan Awal Renja Perubahan Tahun 2025, sebagai berikut :

Rancangan RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase Pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja		564.068.823.840	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase Pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja		564.068.823.840	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	100 Persen	53.883.679	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	100 Persen	53.883.679	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	8.027.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	8.027.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.886.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.886.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	6.015.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	6.015.900	

		n Dokumen Perubahan RKA-SKPD				n Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen DPA-SKPD	1 Doku men	6.975. 300	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen DPA-SKPD	1 D ok u m en	6.975.30 0	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1 Doku men	6.034. 000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1 D ok u m en	6.034.00 0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lapor an	8.187. 479	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah LaporanCa paian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 La po ra n	8.187.47 9	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	8.353. 600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	8.353.60 0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkat nya pelayanan Administra si Keuangan dan Dokumen pelaporan keuangan	100 %	561.68 8.011. 729	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkat nya pelayanan Administra si Keuangan dan Dokumen pelaporan keuangan		561.688. 011.729	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5140 Oran g/bul an	560.79 6.388. 029	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 40 Or an g/ bu la n	560.796. 388.029	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaa n Administra si Pelaksanaa n Tugas	1 Doku men	722.75 6.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaa n Administra si Pelaksanaa n Tugas	1 D ok u m en	722.756. 000	

		ASN				ASN			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	127.238.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	127.238.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9.388.100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9.388.100	
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	10.500.000	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	10.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	2 Laporan	9.420.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	2 Laporan	9.420.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	12.321.600	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	12.321.600	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya ketertiban administrasi dan pelaporan aset/barang milik daerah	100 %	106.285.700	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya ketertiban administrasi dan pelaporan aset/barang milik daerah	100 %	106.285.700	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	48.519.700	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	48.519.700	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	57.766.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	57.766.000	

		pada SKPD				pada SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan Administrasi kepegawaian Dilingkungan Dikbud	100 Perse n	137.167.100	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan Administrasi kepegawaian Dilingkungan Dikbud	100 Perse n	137.167.100	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	0,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	105 Paket	0,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaa an Sistem Informasi Kepegawai an	1 Dokumen	137.167.100	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaa an Sistem Informasi Kepegawai an	1 Dokumen	137.167.100	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	0,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelaksanaa n operasional dan kegiatan kantor	100 Perse n	303.509.480	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelaksanaa n operasional dan kegiatan kantor	100 Perse n	303.509.480	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	50.233.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	50.233.600	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	8 Paket	43.536.780	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	8 Paket	43.536.780	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	10.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	10.500.000	
	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket	4 Paket	8.200.300	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket	4 Pa	8.200.300	

	Kantor	Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Kantor	Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	ke t		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	40.000.000,	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	40.000.000,	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	75.850.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	75.850.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	75.188.800	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	75.188.800	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			131.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			131.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan dan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10	131.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan dan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10	131.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kelancaran Aktivitas kantor	100 Persen	1.295.005.152	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kelancaran Aktivitas kantor	100 Persen	1.295.005.152	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	45.721.652	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	45.721.652	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	1 Laporan	1.249.283.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	1 Laporan	1.249.283.500	

		Disediakan				Disediakan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah	90 Persen	353.961.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah	90 Persen	353.961.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	262.843.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	262.843.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	25 Unit	16.118.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	25 Unit	16.118.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Melek Huruf APK PAUD (SPM) 99,34~ APK SD/MI (SPM) 99~ APK SMP/MTs (SPM) 98~ APM PAUD (SPM) 87~ TPB) 102~ APM 87~ SD/MI 45~ SPM) 100~ TPB) % APM 60~ SMP/MTs 100~ SPM) % TPB) 96,93~ PAUD terakreditasi (%) Persentase siswa dengan Nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan	93,8~ Persen 99,34~ Persen 60~ 98~ Persen 87~ 102~ 87~ Persen 45~ 100~ % 60~ 100~ % 96,93~ %	247.582.254.166	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Melek Huruf APK PAUD (SPM) 99,34~ APK SD/MI (SPM) 99~ APK SMP/MTs (SPM) 98~ APM PAUD (SPM) 87~ TPB) 102~ APM 87~ SD/MI 45~ SPM) 100~ TPB) % APM 60~ SMP/MTs 100~ SPM) % TPB) 96,93~ PAUD terakreditasi (%) Persentase siswa dengan Nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan	93,8~ Persen 99,34~ Persen 60~ 98~ Persen 87~ 102~ 87~ Persen 45~ 100~ % 60~ 100~ % 96,93~ %	247.582.254.166	

		Nilai kompetensi inumerasi yang memenuhi kompetensi minimum SD terakreditasi SMP terakreditasi				siswa dengan Nilai kompetensi inumerasi yang memenuhi kompetensi minimum SD terakreditasi SMP terakreditasi	~ % 10 0~ % 96 ,9 3~ %		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya pengelolaan, proses belajar, sarana dan prasarana, kompetensi kelulusan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan jenjang Sekolah Dasar (SD)	100 %	135.796.037.689	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya pengelolaan, proses belajar, sarana dan prasarana, kompetensi kelulusan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan jenjang Sekolah Dasar (SD)	100 %	135.796.037.689	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	41 Unit	4.583.953.384	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	41 Unit	4.583.953.384	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	853.205.406	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	853.205.406	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel yang tersedia	125	2.383.954.190	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel yang tersedia	125	2.383.954.190	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	25 Paket	697.383.453	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	25 Paket	697.383.453	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba	350 Peserta Didik	435.607.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba	350 Peserta Didik	435.607.000	
	Penyediaan Pendidik dan	Jumlah Pendidik	110 Oran	117.782.500	Pengembangan Karir	Jumlah Pendidik	110	117.782.500	

	Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	g		Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang		
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 orang	188.447.500	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 orang	188.447.500	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	580 Satuan Pendidikan	95.940.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	580 Satuan Pendidikan	95.940.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	580 Satuan Pendidikan	77.542.600.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	580 Satuan Pendidikan	77.542.600.000	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	424 Orang	154.207.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	424 Orang	154.207.000	
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi	200 Orang	171.997.000	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi,	200 Orang	171.997.000	

		dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			
	Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	160	139.055.000	Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	160	139.055.000	
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	200 orang	172.307.500	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	200 orang	172.307.500	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	186.000.000	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	186.000.000	
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	3 Komunitas	173.740.000	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	3 Komunitas	173.740.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	44 Ruang	8.653.606.451	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	44 Ruang	8.653.606.451	
	Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	400 orang	270.580.500	Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	400 orang	270.580.500	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar	580 Satuan Pendidikan	232.650.000	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar	580 Satuan Pendidikan	232.650.000	

							n		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	254 Ruang	34.366.411.415	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	254 Ruang	34.366.411.415	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	456 Peserta Didik	339.330.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	456 Peserta Didik	339.330.000	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	40	4.037.279.390	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	40	4.037.279.390	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya pengelolaan, proses belajar, sarana dan prasarana, kompetensi kelulusan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan jenjang Sekolah Menengah pertama (SMP)	100 %	70.733.792.933	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya pengelolaan, proses belajar, sarana dan prasarana, kompetensi kelulusan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	100 %	70.733.792.933	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	24 Unit	4.786.076.568	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	24 Unit	4.786.076.568	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	77 Ruang	5.659.063.407	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	77 Ruang	5.659.063.407	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	7 Unit	2.097.831.578	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	7 Unit	2.097.831.578	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang	62 Paket	1.271.928.900	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang	62 Paket	1.271.928.900	

		Tersedia				Tersedia			
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	25	814.623.490	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	25	814.623.490	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	240 Peserta Didik	341.054.988	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	150 Peserta Didik	341.054.988	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	363.330.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	363.330.000	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Orang	126.300.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Orang	126.300.000	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400 Orang	276.428.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400 Orang	276.428.000	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	185 Satuan Pendidikan	153.200.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	185 Satuan Pendidikan	153.200.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama	189 Satuan Pendidikan	45.828.300.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama	189 Satuan Pendidikan	45.828.300.000	

		yang Mengelola Dana BOS	dikan		Pertama	yang Mengelola Dana BOS	an Pe nd idi ka n		
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	185 Orang	128.900.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	185 Orang	128.900.000	
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200	175.397.000	Pelatihan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200	175.397.000	
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan Penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	180 Orang	142.055.000	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan Penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	180 Orang	142.055.000	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	173.158.808	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	173.158.808	
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	10 Komunitas	210.030.000	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	10 Komunitas	210.030.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang dibangun	26 ruang	6.358.480.404	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang dibangun	10 ruang	6.358.480.404	
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses	189 Satuan Pendidikan	408.300.000	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses	189 Satuan	408.300.000	

		Belajar				Belajar	Pe nd idi ka n		
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	400 Orang	270.015.000	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	400 Orang	270.015.000	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	1.149.319.790	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	1.149.319.790	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatnya kualitas pendidikan jenjang PAUD	100 %	37.388.376.789	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatnya kualitas pendidikan jenjang PAUD	100 %	37.388.376.789	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	174 Unit	9.196.973.643	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	174 Unit	9.196.973.643	
	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	40 Paket	685.219.000	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	40 Paket	685.219.000	
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD yang Tersedia	10	281.269.163	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD yang Tersedia	10	281.269.163	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik PAUD	50 Peserta Didik	110.000.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik PAUD	50 Peserta Didik	110.000.000	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	100 Orang	0	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	100 Orang	0	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang	300 Orang	129.410.775	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang	300 Orang	129.410.775	

		Mendapat kan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/G olongan, Pemberian Promosi, Peningkata n Kompetens i dan Kualifikasi			Pendidikan PAUD	Mendapat kan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/G olongan, Pemberian Promosi, Peningkata n Kompetens i dan Kualifikasi			
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanak an Pembinaan Kelembaga an dan manajeme n	873 Satua n Pendi dikan	400.00 0.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanak an Pembinaan Kelembaga an dan manajeme n	87 3 Sa tu an Pe nd idi ka n	400.000. 000	
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	841 Satua n Pendi dikan	16.837 .200.0 00	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	84 1 Sa tu an Pe nd idi ka n	16.837.2 00.000	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasn ya dalam Pengelolaa n Dana BOP PAUD	841 Satua n Pendi dikan	415.00 0.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasn ya dalam Pengelolaa n Dana BOP PAUD	84 1 Sa tu an Pe nd idi ka n	415.000. 000	
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan Pengguna an aplikasi di Bidang pendidikan yang dilaksanak an	200 Oran g	200.80 0.100	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan Pengguna an aplikasi di Bidang pendidikan yang dilaksanak an	20 0 Or an g	200.800. 100	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencana an, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Doku men	0,00	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencana an, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 D ok u m en	0,00	
	Sosialisasi dan AdvokasiKebijaka n Bidang Pendidikan	Jumlahkegi atansosiali sasi dan advokasi kebijakan di bidang	2 Doku men	300.00 0.000	Sosialisasi dan AdvokasiKebij akanBidang Pendidikan	Jumlahkegi atansosiali sasi dan advokasi kebijakan di bidang	2 D ok u m en	300.000. 000	

		Pendidikan yang dilaksanakan				Pendidikan yang dilaksanakan			
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Terfasilitasi	2 Komunitas	136.893.500	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Terfasilitasi	2 Komunitas	136.893.500	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	22 Ruang	4.086.386.400	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	22 Ruang	4.086.386.400	
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	30 orang	132.814.310	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	30 orang	132.814.310	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	53 Paket	731.564.400	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	53 Paket	731.564.400	
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	873 Satuan Pendidikan	123.502.880	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	873 Satuan Pendidikan	123.502.880	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	26 Ruang	3.621.342.618	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	26 Ruang	3.621.342.618	
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya kualitas pendidikan non formal/kesetaraan	100 %	3.664.046.755	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya kualitas pendidikan non formal/kesetaraan	100 %	3.664.046.755	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia Bagi Satuan	50 Orang	226.000.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia Bagi Satuan	50 Orang	226.000.000	

		Pendidikan Nonformal /Kesetaraan				Pendidikan Nonformal /Kesetaraan			
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	80 Orang	111.030.400	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	80 Orang	111.030.400	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal /Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemenn	22 Satuan Pendidikan	329.577.995	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal /Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemenn	22 Satuan Pendidikan	329.577.995	
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah NonFormal /Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	22 Satuan Pendidikan	2.904.300.000	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah NonFormal /Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	22 Satuan Pendidikan	2.904.300.000	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	0,00	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	0,00	
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	100 Peserta Didik	93.138.360	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	100 Peserta Didik	93.138.360	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pendidik ASN Bersertifikat	96 %	28.779.472.215			96 %	28.779.472.215	
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga	Meningkatnya kesejahteraan dan	93 %	28.779.472.215			93 %	28.779.472.215	

	Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	kompetensi guru							
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	28.679.472.215	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	28.679.472.215	
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	100.000.000	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	100.000.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Cakupan penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat yang berizin	95%		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Cakupan penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat yang berizin	95%		
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Lembaga Paud dan Pendidikan nonformal baru	90 %	0			90 %	0	
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh	1 dokumen	0	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh	1 dokumen	0	

		Masyarakat				rakan oleh Masyarakat			
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat		1.825.313.114	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat		1.825.313.114	
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok masyarakat pelestari kebudayaan yang difasilitasi	45 Perse n	137.011.750	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok masyarakat Pelestari kebudayaa n yang difasilitasi	45 Per sen	137.011.750	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek	137.011.750	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 O bj ek	137.011.750	
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat pelaku kesenian yang difasilitasi	45%	1.688.301.364	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat pelaku kesenian yang difasilitasi	45 %	1.688.301.364	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Objek	1.688.301.364	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 O bj ek	1.688.301.364	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang Menonton secara langsung Pertunjukan seni	19~% 37~% 37~% 75~% 19~% 75~%	626.456.232	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang Menonton secara langsung pertunjukan seni	19 ~ % 37 ~ % 37 ~ % 75 ~ %	626.456.232	

		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang Pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni Persentase penduduk yang Pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)				Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang Pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni Persentase penduduk yang Pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	% 19 ~ % 75 ~ %		
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok kesenian yang difasilitasi	45 %	626.456.232	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok kesenian yang difasilitasi	45 %	626.456.232	
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	300 Org	340.155.000	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	300 Org	340.155.000	
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	24	286.301.232	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	24	286.301.232	
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang	70%	72.226.000	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang Mengunju	70 %	72.226.000	

		Mengunjungi peninggalan Sejarah				ngi peninggalan sejarah			
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat yang dapat mengakses informasi sejarah	80%	72.226.000				72.226.000	
	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 dokumen	72.226.000				72.226.000	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	7~7~7~Per sen 7~unit	226.227.280	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi Register Cagar Budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) Register Cagar Budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	7~7~7~Persen 7~unit	226.227.280	
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Operasional cagar budaya	25 Persen	226.227.280	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Operasional cagar budaya	25 Persen	226.227.280	

	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	2 objek	226.227.280	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Dikembangkan	2 objek	226.227.280	
--	---------------------------	---	---------	-------------	---------------------------	---	---------	-------------	--

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan adalah sejalan dengan sasaran program yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur. Usulan masyarakat antara lain :

- a. Pembangunan beberapa ruang kelas baru PAUD di beberapa kecamatan
- b. Rehab ruang kelas PAUD di beberapa kecamatan
- c. Pengadaan sarana dan prasarana bermain seperti APE dalam dan luar, drumband dan mebelair PAUD
- d. Pembangunan perpustakaan, jamban dan laboratorium pada jenjang SMP
- e. Pembangunan perpustakaan, jamban, paving, pagar pada jenjang SD dan sarana belajar lainnya
- f. Rehabilitasi ruang kelas SD di beberapa kecamatan
- g. Penambahan ruang kelas baru di berbagai sekolah di kecamatan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs
- h. Pengadaan Mebelair pada SD dan SMP
- i. Pengadaan sarana dan prasarana kesenian modern/tradisional dari beberapa sanggar seni dan budaya

Selain usulan dari Masyarakat juga ada usulan dari pemangku kepentingan dalam hal ini adalah Anggota DPRD melalui aplikasi e-Pokir. Berikut ini adalah tabel Usulan program dan kegiatan dari Pemangku dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Lampung Timur

No	Usulan	Alamat	Koefisien	Rekomendasi Setwan	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD	Status
1.	Pengadaan Laptop Sekolah Lembaga PAUD/TK	PAUD KOBER ISLAM AL ABROR Desa Sumber Agung Kecamatan Metro Kibang, Kab. Lampung Timur	5 Unit	Rekomendasi : setuju Koefisien : 5 Unit Anggaran : 75.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai Dengan kamus usulan Koefisien : 5 paket Anggaran : 75.000.000	Rekomendasi : Setuju, bisa dianggarkan melalui Dana DAU SG Koefisien : 5 paket Anggaran : 75.000.000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

2	Pengadaan Drumband SMP	SMP UNGGULAN AL FALAHJI . Sofyan Sahuri Desa Mumbang Jaya Kab. Lampung Timur	1 Set	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Set Anggaran : 25.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai Dengan kamus usulan Koefisien : 1 Set Anggaran : 25.000.000	Rekomendasi : Setuju, bisa dianggarkan melalui Dana DAU SG Koefisien : 1 Set Anggaran : 38.000.000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
3	Pembangunan Paving Halaman Sekolah (SMP)	Jl Sofyan Sahuri Dusun VI Desa Mumbang Jaya Jabung Kab. Lampung Timur	1 Paket	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Set Anggaran : 23.400.000	Rekomendasi : Belum sesuai Dengan kamus Usulan karena tidak ada nama sekolahnya Koefisien : 1 Set Anggaran :	Rekomendasi : Belum sesuai Dengan kamus usulan karena tidak ada nama sekolahnya Koefisien : 1 Set Anggaran :	
4	Pengadaan Mebel SMP	Jl Sofyan Sahuri No 17 Desa Mumbang Jaya Kecamatan Jabung Kab. Lampung Timur	2 Paket	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Set Anggaran : 19.000.000	Rekomendasi : Belum sesuai dengan kamus usulan karena tidak ada nama sekolahnya Koefisien : 1 Set Anggaran :	Rekomendasi : Belum sesuai dengan kamus usulan karena tidak ada nama sekolahnya Koefisien : 1 Set Anggaran :	
5	Pembangunan Pagar Sekolah Lembaga PAUD/TK	RA (PAUD) JAMIATUL IKHWAN Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru, Kab. Lampung Timur	100 meter	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Set Anggaran : 190.000.000			
6	Pembangunan Pagar Sekolah Jenjang SD	MIS NU (SD) Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru Kab. Lampung Timur	100 meter	Rekomendasi : setuju Koefisien : 50 m2 Anggaran : 190.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 50 m2 Anggaran : 190.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 50 m2 Anggaran : 137.000.000	
7	Pengadaan Drumband SMP	Dusun VI SMP MAARIF NU Mataram Baru, Kab. Lampung Timur	1 set	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Set Anggaran : 25.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 Set Anggaran : 25.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 Set Anggaran : 38.000.000	
8	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pada Lembaga PAUD	PAUD Kober Tunas Harapan Desa Way Areng Kecamatan Mataram Baru, Kab. Lampung Timur	1 Paket	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Ruang Anggaran : 174.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 ruang Anggaran : 174.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 ruang Anggaran : 174.225.000	
9	Rehabilitasi Sedang/Berat kelas Jenjang SD	SD N 4 Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung, Kab. Lampung Timur	1 Ruang	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 ruang Anggaran : 125.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 ruang Anggaran : 125.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 ruang Anggaran : 374.957.500	
10	Pembangunan Ruang Kepala Sekolah	MI Darul Hikmah Desa Gunung Mas Kecamatan Marga Sekampung, Kab. Lampung	6 ruang	Rekomendasi : setuju Koefisien : 6 Ruang Anggaran	Rekomendasi : Disetujui tapi volume disesuaikan dengan kamus usulan Koefisien : 2	Rekomendasi : Disetujui tapi volume disesuaikan dengan kamus usulan Koefisien : 2 Ruang Anggaran 375.475.000	

		Timur		n : 100.000.000	Ruang Anggaran : 100.000.000		
11	Pengadaan Mebel Sekolah Jenjang SD	SD Islam Girimulyo Mulyo Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung, Kab. Lampung Timur.	6 ruan g/pake t	Rekomen da si : setuju Koefisien : 1 Set Anggaran : 18.300.000	Rekomendasi : Koefisien : 1 Set Anggaran: 18.300.000	Rekomendasi : Koefisien : 1 Set Anggaran	
12	Rehabilitasi Gedung Kelas/ Ruang Kantor/ Ruang Guru Pada Lembaga PAUD	PERMATA BUNDA Desa Tritunggal Kec Waway Karya, Kab. Lampung Timur	1 Pake t	Rekomen da si : setuju Koefisien : 1 Set Anggaran : 125.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 ruang Anggaran : 125.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 ruang Anggaran : 124.947.500	
13	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas (SMP)	MTS Nurul Falah Desa Gedung Wani Timur Kec Marga Tiga, Kab. Lampung Timur	1 Pake t	Rekomen da si : setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 135.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 ruang Anggaran : 125.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 ruang Anggaran : 138.000.000	
14	Rehabilitasi Sedang/ Berat kelasJenjang SD	SDN1 Desa Tritunggal Kec Waway Karya, Kab. Lampung Timur	1 Pake t	Rekomen da si : setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 125.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 ruang Anggaran : 125.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 ruang Anggaran : 249.550.000	
15	Gamelan Talo Balak (Bahan Perunggu)	Kecamatan Way Jepara, Kab. Lampung Timur	1 pake t	Rekomen da si : setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 50.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai Dengan kamus usulan Koefisien : 1 paket Anggaran : 50.000.000	Rekomendasi : Sebenarnya belum sesuai dengan kamus usulan Karena tidak ada nama anggarnya namun sudah mengantar proposalnya Koefisien : 1 paket Anggaran : 75.800.000	
16	Pembangunan Pagar Sekolah Lembaga PAUD/ TK	Desa Sripendowo Kecamatan Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur	1 pake t	Rekomen da si : setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 190.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai Dengan kamus usulan Koefisien : 1 paket Anggaran : 190.000.000	Belum sesuai dengan kamus usulan karena tidak ada nama sekolahnya Koefisien : Anggaran :	
17	Pengadaan Laptop Sekolah Lembaga PAUD/ TK	Paud Berlian, Dusun V, Desa Taman Bogo, Purbolinggo., Kab. Lampung Timur	1 Pake t	Rekomen da si : setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 15.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai Dengan kamus usulan Koefisien : 1 paket Anggaran : 15.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai Dengan kamus usulan Koefisien : 1 ruang Anggaran : 15.000.000	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 terjabarkan kerangka besar visi, misi dan program kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada *Nawa Cita* Presiden Joko Widodo adalah mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan visi pendidikan nasional ialah menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/InsanParipurna) pada 2024. Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Usaha mencapai Visi 2024 tersebut dibagi menjadi empat tema pembangunan pendidikan nasional. Tema pembangunan yang kedua (2020-2024) difokuskan pada penguatan layanan pendidikan. Sejalan dengan fokus tersebut, Visi Kemendikbud 2024 adalah terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif. Yang dimaksud dengan layanan prima pendidikan nasional adalah layanan Pendidikan yang:

- 1. Tersedia secara merata di seluruh pelosok nusantara;
- 2. Terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
- 3. Berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri;
- 4. Setara bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan Memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, gender,dan sebagainya; dan
- 5. Menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.

Untuk mencapai visi Kemendikbud 2024, ditetapkan 3 (Tiga) Misi Kemendikbud 2020-2024 yang dikemas sebagai berikut :

KODE	MISI
M1	Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
M2	Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
M3	Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Tujuan strategis Kemendikbud Tahun 2020-2024 dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi 2024 Kemendikbud dengan memperhatikan rumusan misi Kemendikbud 2020-2024.

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan Strategis Kemendikbud 2020-2024 adalah sebagai berikut :

KODE	TUJUAN
T1	Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
T2	Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik
T3	Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
T4	Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan
T5	Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan Pendidikan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024. Sasaran strategis untuk tiap tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
SS.1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	- Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun - Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat - Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi
SS.2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi	- Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)

	pendidikan di seluruh jenjang	- Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum - Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum - Nilai rata-rata hasil PISA : Membaca - Nilai rata-rata hasil PISA : Matematika - Nilai rata-rata hasil PISA : Sains - Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan - Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan - Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional - Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri - Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri
SS 3	Menguatnya karakter Peserta didik	- Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam Pembangunan karakter - Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila - Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar
SS 4	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan	- Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia - Jumlah penutur muda bahasa daerah - Indeks Pembangunan Kebudayaan
SS 5	Meningkatnya tata kelola	- Opini laporan keuangan

	pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Kemendikbud - Indeks efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan - Indeks kepuasan pemangku Kepentingan Kemendikbud - Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud
--	--	---

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus mengacu pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan dimaksud. Untuk itu diperlukan dana yang mendukung pemenuhan SPM, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang dan merupakan penjabaran misi dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif. Tujuan harus searah dengan visi dan misi organisasi, jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program. Sebelum menetapkan tujuan, diperlukan suatu alat bantu berupa metode atau analisis yang dapat memberikan suatu rujukan teoritis dalam menggambarkan situasi dan kondisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan sasaran RPJMD maka ditetapkan tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut:

1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan
2. Meningkatkan pelestarian seni dan budaya
3. Pengelolaan administrasi dan pelayanan publik yang optimal

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan suatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif, sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------------|--|
| Tujuan 1 | : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan |
| Sasaran 1 | : Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan pendidikan |
| Sasaran 2 | : Meningkatkan kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan |
| Tujuan 2 | : Meningkatkan pelestarian seni dan budaya |
| Sasaran 1 | : Meningkatkan pengembangan seni, budaya dan cagar budaya |
| Tujuan 3 | : Pengelolaan Administrasi dan Pelayanan Publik yang Optimal |
| Sasaran 1 | : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi |

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan 2025 mengacu pada pencapaian visi misi kepala daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 yang dirinci dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026. Dalam dokumen perencanaan jangka menengah tersebut telah dijabarkan indikator dan target capaian tiap tahun yang harus dicapai dengan program dan kegiatan tertentu sebagai berikut :

1. Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pengembangan Kurikulum
4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
6. Program Pengembangan Kebudayaan
7. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
8. Program Pembinaan Sejarah
9. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk masing – masing program adalah sebagai berikut :

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

I. Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- g. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Pengelolaan Pendidikan

- 1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**
 - a. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah
 - d. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
 - f. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
 - g. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
 - h. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
 - i. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
 - j. Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
 - k. Sub Kegiatan Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan
 - l. Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
 - m. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
 - n. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - o. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru

- p. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
- q. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
- r. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- s. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- t. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
- u. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
- v. Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- a. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- b. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- c. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- d. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- e. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah
- f. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- g. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
- h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
- i. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- j. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- k. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- l. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- m. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- n. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- o. Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
- p. Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
- q. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
- r. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- s. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru
- t. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL

untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

- u. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
- v. Sub Kegiatan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik

b. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- a. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
- b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD
- c. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan PAUD
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
- f. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
- g. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
- h. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD
- i. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
- j. Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
- k. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
- l. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- m. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru
- n. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas bidang Pendidikan
- o. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Paud
- p. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
- q. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

c. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- b. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- c. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- d. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- e. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP sekolah Nonformal/Kesetaraan.
- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

- a. Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, Paud dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- b. Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

1. Kegiatan Penerbitan Izin Paud dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat

- a. Penilaian Kelayakan usul perizinan Paud dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

I. Program Pengembangan Kebudayaan

1. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

2. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

II. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

1. Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

III. Program Pembinaan Sejarah

1. Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah

IV. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

1. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 2025 ada pada lampiran 3.3.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 disusun sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai. Ketersediaan anggaran masih menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan renja yang sesuai dengan kebutuhan. Jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan renja maka diperlukan penyesuaian seperti pengurangan sub kegiatan yang memiliki prioritas paling sedikit dalam mendukung target IKU dan IKK dan tetap memperhatikan program kegiatan yang menjadi mandatory spending.

Selain itu juga dapat dilakukan dengan penyesuaian target output kegiatan akan tetapi tetap mempertimbangan capaian target IKU maupun IKK tahunan dalam renstra. Setiap unsur perangkat daerah harus senantiasa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana yang sudah ditetapkan. Diperlukan juga koordinasi yang baik antar unsur perangkat daerah untuk menyukseskan pelaksanaan renja 2025. Rencana tindaklanjut yang perlu dilakukan ke depan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada untuk melaksanakan kegiatan sesuai target yang ditetapkan;
2. Memperkuat koordinasi antar unsur perangkat daerah dan stakeholder;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala melalui kunjungan lapangan, pembuatan laporan, rapat koordinasi berkala, pendampingan teknis, dll;
4. Menyusun dan melaksanakan standar operasional prosedur kegiatan.

Demikian Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2025 dengan lebih baik, sehingga pada akhirnya dapat tercapai pembangunan pendidikan dan kebudayaan seperti diharapkan dan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

Sukadana, 15 Juni 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



MARSAN, S.Pd. Ing.M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 19680610 199203 1 015

RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA-SKPD) TAHUN 2025



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2024



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup tahap perumusan rancangan Renja SKPD dan tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Kepala Bappeda mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RKPD berdasarkan rancangan Renja SKPD, sedangkan RKPD dijadikan dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) dan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bidang perencanaan, maka dibutuhkan beberapa sarana dan prasarana pendukung terhadap pelaksanaan tugas Bappeda Kabupaten Lampung Timur diantaranya meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana penunjang lainnya. Sesuai dengan amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lampung Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 ini menyusun Buku Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025. Renja SKPD ini merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berguna untuk mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam perumusan Renja SKPD adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah.
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari Rencana Kerja ini adalah merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur selama tahun 2025.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lampung Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Bappeda Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya renja, struktur organisasi Bappeda Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas SKPD.
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisikan program dan kegiatan yang direncanakan yang merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan yang diambil dalam mewujudkan tujuan.

BAB V PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Lampung Timur Tahun Lalu Dan Capaian Renstra SKPD

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024

Alokasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 secara keseluruhan adalah Rp. 12.389.043.677,00 dan terealisasi sebesar 90,70 % atau Rp. 11.236.456.210,00 Pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan tahun anggaran 2024 tersebut telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lampung Timur, secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 dapat memenuhi kriteria dengan baik.

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 8.480.505.677,-; dan realisasi fisik keuangan sampai dengan bulan Desember 2024 sebesar Rp. 8.053.334.048,- (94,96%).

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 117.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 102.760.800,- (87,83%).

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 69.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 60.910.800,- (88,28%)
Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
Outcome: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 48.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 41.850.000,- (87,19%)
Output: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Outcome: Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.591.261.577,-, terealisasi sebesar Rp. 6.411.133.948,- (97,27%).

Sub Kegiatan :

- 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.158.052.652,-, terealisasi sebesar Rp. 5.987.966.948,- (97,24%)

Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.

Outcome: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.

- 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan alokasi dana sebesar Rp. 247.708.925,-, terealisasi sebesar Rp. 240.165.000,- (96,95%)

Output: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Outcome: Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

- 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 115.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 113.945.000,- (99,08%)

Output: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Outcome: Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

- 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.500.000,-, terealisasi sebesar Rp. 20.025.000,- (97,68%)

Output: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Outcome: Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

- 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 29.122.000,- (97,07%)

Output: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

Outcome: Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 19.910.000,- (99,55%)
Output: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
Outcome: Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp 40.000.000,-, terealisasi sebesar Rp.35.190.000,- (87,98%).

Sub Kegiatan :

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 40.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 35.190.000,- (87,98%).
Output: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
Outcome: Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 558.500.000,-, terealisasi sebesar Rp. 511.177.240,- (91,53%).

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 47.590.000,- (95,18%).
Output: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.
Outcome: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 49.915.000,- (99,83%).
Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.
Outcome: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 45.565.000,- (91,13%).
Output: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan.
Outcome: Tersedianya Peralatan Rumah Tangga.
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp. 25.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 22.430.000,- (89,72%).
Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.
Outcome: Tersedianya Bahan Logistik Kantor.

5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 77.500.000,-, terealisasi sebesar Rp. 70.320.000,- (90,74%).
Output: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan.
Outcome: Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan.
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 270.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 239.357.240,- (88,65%).
Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Outcome: Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 36.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 36.000.000,- (100%)
Output: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
Outcome: Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 223.244.100,-, terealisasi sebesar Rp. 196.470.000,- (88,01%).

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Aset Tetap Lainnya, dengan alokasi dana sebesar Rp. 223.244.100,-, terealisasi sebesar Rp. 196.470.000,- (88,01%).
Output: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan.
Outcome: Tersedianya Aset Tetap Lainnya.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 369.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 356.840.245,- (96,70%).

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi dana sebesar Rp. 56.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 49.940.125,- (89,18%).
Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.
Outcome: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp. 313.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 306.900.120,- (98,05%).
Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.
Outcome: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 478.500.000,-, terealisasi sebesar Rp. 439.761.815,- (91,90%).

Sub Kegiatan :

- 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 338.500.000,-, terealisasi sebesar Rp. 335.139.815,- (99,01%).

Output: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.

Outcome: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

- 2. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, dengan alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 49.170.000,- (81,95%).

Output: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara.

Outcome: Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.

- 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan alokasi dana sebesar Rp. 80.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 55.452.000,- (69,32%).

Output: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.

Outcome: Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

b) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.187.130.000,-;dan realisasi fisik keuangan sampai dengan bulan Desember 2024 sebesar Rp. 933.492.200,- (78,63%).

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 656.547.700,-, terealisasi sebesar Rp. 553.826.300,- (84,35%)

Sub Kegiatan :

- 1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 170.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 127493.900,- (75,00%)

Output: Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik).

Outcome: Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD

2. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya, dengan alokasi dana sebesar Rp. 39.300.000,-, terealisasi sebesar Rp. 34.242.900,- (87,13%)
Output: Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah.
Outcome: Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain.
3. Pelaksanaan Konsultasi Publik, dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 36.835.400,- (73,67%)
Output: Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik.
Outcome: Terlaksananya Konsultasi Publik.
4. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 59.630.000,-, terealisasi sebesar Rp. 59.212.700,- (99,30%)
Output: Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
Outcome : Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
5. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp. 95.811.000,-, terealisasi sebesar Rp. 80.466.100,- (83,98%)
Output : Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota.
Outcome: Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota.
6. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 91.806.700,-, terealisasi sebesar Rp. 87.694.900,- (95,52%)
Output : Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan.
Outcome: Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan.
7. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp. 150.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 127.880.400,- (85,25%)
Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD).
Outcome: Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi dan sebesar Rp. 126.038.000,-, terealisasi sebesar Rp 69.045.700,- (54,78%).

Sub Kegiatan :

1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 52.513.300,-, terealisasi sebesar Rp. 37.410.800,- (71,24%)

Output: Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah).

Outcome: Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 41.860.500,-, terealisasi sebesar Rp. 24.347.600,- (58,16%)

Output: Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi.

Outcome: Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.

3. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp. 31.664.200,-, terealisasi sebesar Rp. 7.287.300,- (23,01%)

Output: Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan.

Outcome: Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah ,dengan alokasi dana sebesar Rp. 225.974.800,-, terealisasi sebesar Rp. 145.948.800,- (64,59%).

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp. 70.652.000,-, terealisasi sebesar Rp. 47.271.400,- (66,91%).

Output : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan.

Outcome: Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota.

2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 135.322.800,-, terealisasi sebesar Rp. 98.677.400,- (72,92%).

Output : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah.

Outcome: Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

4. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 178.569.500,-, terealisasi sebesar Rp. 164.671.400,- (92,22%).

Sub Kegiatan :

1. Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 148.569.600,-, terealisasi sebesar Rp. 147.499.500,- (99,28%).

Output : Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola.

Outcome: Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.

2. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp. 29.999.900,-, terealisasi sebesar Rp. 17.171.900,- (57,24%).

Output : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Outcome: Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

c) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.131.387.500,-; dan realisasi fisik keuangan sampai dengan bulan Desember 2024 sebesar Rp. 1.712.249.922,- (80,33%).

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan alokasi dana sebesar Rp. 798.643.100,-, terealisasi sebesar Rp. 595.514.900,- (74,57%).

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan alokasi dana sebesar Rp. 164.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 113.046.200,- (68,93%).

Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Outcome: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 41.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 29.763.300,- (72,59%).

Output : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah.

Outcome: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.

3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 70.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 57.863.200,- (82,66%).

Output : Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.

Outcome: Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.

4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 121.643.100,-, terealisasi sebesar Rp. 85.490.500,- (70,28%).

Output: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan.

Outcome: Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan.

5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan alokasi dana sebesar Rp. 160.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 98.109.600,- (61,32%).

Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD).

Outcome: Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD).

6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dengan alokasi dana sebesar Rp. 37.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 23.973.500,- (64,79%).

Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia.

Outcome: erasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dengan alokasi dana sebesar Rp. 110.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 102.438.400,- (93,13%).

Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia.

Outcome: Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dengan alokasi dana sebesar Rp. 95.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 84.830.200,- (89,29%).

Output: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia.

Outcome: Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia.

2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dengan alokasi dana sebesar Rp. 573,531,600,-, terealisasi sebesar Rp. 464.095.200,- (80,92%).

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan alokasi dana sebesar Rp. 56.931.600,-, terealisasi sebesar Rp. 38.513.600,- (74,767,650%).

Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD).

Outcome: Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD).

2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, dengan alokasi dana sebesar Rp. 19.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 18.852.900,- (99,23%).
Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian.
Outcome: Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, dengan alokasi dana sebesar Rp. 89.900.000,-, terealisasi sebesar Rp. 69.077.000,- (76,84%).
Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian.
Outcome: Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, dengan alokasi dana sebesar Rp. 96.700.000,-, terealisasi sebesar Rp. 77.179.100,- (79,81%).
Output: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian.
Outcome: Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian.
5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan alokasi dana sebesar Rp. 90.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 81.750.700,- (90,83%).
Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
Outcome: Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.500.000,-, terealisasi sebesar Rp. 20.347.400,- (99,26%).
Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA.
Outcome: Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.

7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, dengan alokasi dana sebesar Rp. 99.500.000,-, terealisasi sebesar Rp. 80.601.500,- (81,01%).

Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA.

Outcome: Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.

8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA), dengan alokasi dana sebesar Rp. 101.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 77.773.000,- (77,00%).

Output: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA.

Outcome: Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA.

3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 759,212,800,-, terealisasi sebesar Rp. 652.639.822,- (85,96%).

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan alokasi dana sebesar Rp. 112.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 104.693.410,- (93,48%).

Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD).

Outcome: Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD).

2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, dengan alokasi dana sebesar Rp. 62.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 54.020.000,- (87,13%).

Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur.

Outcome: Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.

3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, dengan alokasi dana sebesar Rp. 61.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 51.465.000,- (84,37%).
Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur.
Outcome: Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, dengan alokasi dana sebesar Rp. 76.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 51.530.000,- (67,80%).
Output: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur.
Outcome: Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur.
5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan alokasi dana sebesar Rp. 280.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 266.142.412,- (95,05%).
Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
Outcome: Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan), dengan alokasi dana sebesar Rp. 27.212.800,-, terealisasi sebesar Rp. 5.890.000,- (21,64%).
Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan.
Outcome: Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan), dengan alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 41.794.000,- (69,66%).
Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan.
Outcome: Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.

8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 81.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 77.105.000,- (95,19%).

Output: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan.

Outcome: Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan.

d) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Program Pengembangan Data/Informasi, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 590.020.500,-; dan realisasi fisik keuangan sampai dengan bulan Desember 2024 sebesar Rp. 537.380.040,- (91,08%).

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 289.377.800,-, terealisasi sebesar Rp. 244.059.300,- (84,34%).

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum, dengan alokasi dana sebesar Rp. 114.089.800,-, terealisasi sebesar Rp. 93.849.800,- (82,26%).

Output: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum.

Outcome: Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum.

2. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi, dengan alokasi dana sebesar Rp. 19.188.000,-, terealisasi sebesar Rp. 19.008.000,- (99,06%).

Output: Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi.

Outcome: Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi.

3. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi, dengan alokasi dana sebesar Rp. 37.300.000,-, terealisasi sebesar Rp. 30.477.800,- (81,71%).

Output: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi.

Outcome: Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi.

4. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 118.800.000,-, terealisasi sebesar Rp. 100.723.700,- (84,78%).

Output: Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik.

Outcome: Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik.

2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dengan alokasi dana Rp. 139.050.000,-, terealisasi sebesar Rp. 133.536.740,- (96,04%)

Sub Kegiatan :

1. Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 139.050.000,-, terealisasi sebesar Rp. 133.536.740,- (96,04%).

Output: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan.

Outcome: Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan.

3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, dengan alokasi dana Rp. 161.592.700,-, terealisasi sebesar Rp. 159.784.000,- (98,88%)

Sub Kegiatan :

1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi, dengan alokasi dana sebesar Rp. 161.592.700,-, terealisasi sebesar Rp. 159.784.000,- (98,88%).

Output: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.

Outcome: Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.

2.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan triwulan II

Alokasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 secara keseluruhan adalah Rp. 12.171.219.470,00 dan terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar 52,02% atau Rp. 5.114.023.969,00. Pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024 tersebut sampai dengan triwulan II masih rendah namun diperkirakan akan sesuai target di akhir tahun.

2.1.3. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. IKU yang ditentukan akan berdampak terhadap perilaku dan budaya yang terbentuk dalam organisasi tersebut.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Bappeda Kabupaten Lampung Timur telah menetapkan 5 (Lima) Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026. Untuk meningkatkan akuntabilitasnya, Bappeda Kabupaten Lampung Timur juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama. Reviu Indikator Kinerja Utama dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Bappeda Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 secara rata-rata mendekati target, yaitu sebesar 90 %.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah dan provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih baik, dalam rangka menerpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan

daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota masih belum optimal.

Melihat kondisi tersebut diatas Bappeda Kabupaten Lampung Timur selaku Badan Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur, terus mengalami peningkatan kualitas. Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah meliputi :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan perencanaan partisipatif yang ditandai dengan peningkatan peran serta aktif berbagai unsur terkait pembangunan daerah dalam Musrenbang yang telah agenda tetap tahunan Pemda Lampung Timur;
2. Meningkatnya kualitas koordinasi dengan SKPD dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah;
3. Meningkatnya keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
4. Meningkatnya kualitas pendampingan perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan oleh BAPPEDA dan SKPD Teknis terkait;
5. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan serta penyediaan data dalam rangka mendukung penyusunan dokumen perencanaan;
6. Meningkatnya kualitas hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai bahan untuk perencanaan selanjutnya.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Belum optimalnya aplikasi dokumen perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh intern Bappeda maupun oleh dinas teknis terkait;
2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;
3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;
4. Belum adanya sistem informasi perencanaan manajemen perencanaan yang layak;
5. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeda;
6. Kebijakan pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemda Lam Tim;
7. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM;
8. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain;
9. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan *bottom up*;
10. Belum optimalnya pengelolaan dan ketersediaan data pembangunan sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;
11. Belum optimalnya kerjasama pembangunan antara pemerintah dan dunia usaha/lembaga;
12. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur;
13. Program dan kegiatan yang diusulkan dan akan dilaksanakan oleh SKPD belum berjalan optimal.

Dalam perkembangan Bappeda kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, BAPPEDA diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas SKPD

Badan perencanaan pembangunan daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur, dan berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur, merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung timur. Bappeda Kabupaten Lampung Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, maka Bappeda Kabupaten Lampung Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis tertentu di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan kerjasama penelitian dan perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga perguruan tinggi dan lembaga lain baik pemerintah maupun swasta;
- f. pemantauan dan evaluasi, penelitian dan perencanaan pembangunan daerah;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, maka Bappeda Kabupaten Lampung Timur menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama lima tahun ke depan, sebagai berikut.

Tujuan pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur secara umum adalah terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akuntabel untuk mencapai target indikator kinerja daerah, yang akan menjadi acuan bagi organisasi Bappeda Kabupaten Lampung Timur dalam perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah perencanaan pembangunan daerah yang dirumuskan secara :

Tujuan

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM perencanaan pembangunan, serta kualitas dan kuantitas, sarana dan prasarana penunjang kinerja perencanaan.
2. Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.
3. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas koordinasi perencanaan dan kerjasama pembangunan daerah, serta fasilitasi pencarian sumber-sumber pendanaan.
4. Mengoptimalkan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan di daerah
5. Menyediakan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

Sasaran

1. Memberdayakan SDM perencanaan pembangunan dengan kemampuan teknis dan disiplin pegawai disertai tersedianya sarana dan prasarana kinerja perencanaan yang baik.
2. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJM Daerah, RKPD, Rencana Tata Ruang di Daerah) yang berkualitas, terpadu dan tepat waktu.
3. Terlaksananya evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan baik yang dibiayai dari APBN, dan APBD (Provinsi, kabupaten).
4. Terlaksananya monitoring, evaluasi, pengendalian dan koordinasi lintas sektor serta lintas wilayah terhadap pelaksanaan pembangunan daerah

5. Terbangunnya kerjasama pembangunan dengan Daerah lain yang berkelanjutan dan Terfasilitasinya pencarian sumber- sumber pendanaan pembangunan.

Selanjutnya, pada Tabel di bawah ini ditampilkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Bappeda guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan pro rakyat sebagaimana tujuan pada Misi ke-6 RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur Nomor 81 tahun 2021 Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah KAbupaten Lampung timur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Keuangan
3. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
4. Bidang Sosial Budaya
5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan
7. Bidang Pendanaan dan Pengendalian
8. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
9. Kelompok Jabatan Fungsional

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung timur Tahun 2024. Sejalan dengan kebijakan Provinsi Lampung, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro ekonomi dan makro sosial , yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Bappeda Kabupaten Lampung Timur dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Bappeda dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Proses penyusunan Rencana Kerja Bappeda tahun 2024 telah dituangkan didalam Dokumen Rancangan Awal RKPD (Ranwal RKPD) tahun 2024, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Didalam RPJMD 2021-2026 arah kebijakan pembangunan nasional merupakan kebijakan utama yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis yang telah teridentifikasi dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memberikan arah dan prioritas pembangunan maka diperlukan perencanaan pembangunan, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan RPJMN tahap ke-4 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dan merupakan kelanjutan dari RPJMN periode sebelumnya (RPJMN 2015-2019). Berdasarkan hasil evaluasi, RPJMN 2015-2019 telah menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan, namun belum seluruh bagian yang ada dalam RPJMN tersebut dapat dioperasionalkan dengan baik. Hal ini disebabkan antara lain : (1) Penyusunan struktur kebijakan yang ada dalam RPJMN 2015-2019 belum semuanya menggunakan kerangka kerja logis (*logical framework*) yang sesuai, sehingga rumusan sasaran dan arah kebijakannya menjadi tidak jelas; (2) Indikator yang digunakan masih belum dirumuskan dengan baik dan terukur; (3) Terdapat perbedaan penggunaan istilah dan sistematika dalam Buku I, II dan III RPJMN sehingga sulit menemukan benang merah antara ketiga buku tersebut.

3.2 Tujuan dan Sasaran SKPD

Dalam rangka mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2021-2026, maka program Bappeda Kabupaten Lampung Timur tidak lepas dari visi, misi dan program Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Visi dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap IV RPJPD Kabupaten Lampung Timur. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok sangat bergantung pada tekanan dan prioritas pembangunan. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026, yaitu :

“RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA”

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

Kehidupan Masyarakat yang Religius

Kehidupan masyarakat yang memiliki tata hubungan kemasyarakatan berdasarkan nilai-nilai agama (religius), kearifan lokal dan hukum, sehingga dapat tercipta sinergitas kerja yang optimal dalam rangka membangun Kabupaten Lampung Timur. Hubungan erat dan mendalam antara manusia dengan Tuhan dalam segala kiprah dan karyanya dalam kehidupan, artinya masyarakat Lampung Timur selalu mengaitkan segala perbuatan, kiprah, karya dan hasil baktinya dalam konteks hubungan khalik (pencipta hidup) dan makhluk (penikmat hidup) yang dilandasi rasa ikhlas, tulus dan syukur. Tata hubungan masyarakat tersebut mencakup hubungan antar dan inter agama, antar suku, antar budaya, senantiasa memegang teguh kebhinekaan dalam suasana yang agamis. Kondisi masyarakat Lampung Timur yang kental sekali dengan nilai-nilai agama akan menjadi modal dasar dalam membangun Lampung Timur kedepan.

Kehidupan Masyarakat yang Berdaya saing

Kehidupan masyarakat yang memiliki kekuatan potensi yang ada untuk dapat bersaing dan memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Aset utama daerah salah satunya ditentukan oleh kualitas sumber daya masyarakatnya. Satu juta lebih penduduk Kabupaten Lampung Timur kedepan diharapkan unggul, berkualitas, mampu

berkompetisi, bisa berinovasi dan juga kreatif dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan nilai tambah (added value) yang tinggi, guna meningkatkan kualitas hidupnya.

Kehidupan Masyarakat yang Berkeadilan

Kehidupan masyarakat yang berkeadilan mengandung makna suatu keadaan tatanan dasar kehidupan masyarakat Lampung Timur yang dapat terlayani secara adil dan merata diberbagai bidang kehidupan, dengan cukupnya ketersediaan fasilitas dan pelayanan dasar masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan aman tenteram dan damai. Tatanan dasar tersebut mencakup infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia yang berkualitas, iklim usaha yang kondusif, dan pemerintahan daerah yang profesional, jujur, pedulim dan merakyat.

Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera

Kehidupan masyarakat yang sejahtera mengandung makna kondisi masyarakat yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan dasarnya sehingga dapat hidup aman, nyaman, tenteram, damai, sentosa dan makmur lahir batin. Kebutuhan dasar tersebut mencakup kebutuhan pangan, sandang dan papan, sedangkan pelayanan dasar yang dimaksud adalah pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang, pelayanan keamanan ketertiban, ketentraman, dan perlindungan masyarakat, serta pelayanan sosial. Disamping itu pembangunan infrastruktur diperlukan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Bappeda adalah peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme apatur Bappeda dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan. Berdasarkan pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2025, pelaksanaan kinerja Bappeda Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Operasi yang anggarannya diperuntukan untuk belanja pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal, dengan ruang lingkup kegiatannya.

Matrik Rencana Kerja

Program dan Kegiatan Pembangunan yang Akan Dilaksanakan Oleh Bappeda Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01				PERENCANAAN				13.675.150.910,00				15.951.356.502,60
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Lampung Timur	77	10.192.985.502,00			78	10.573.089.315,00
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Lampung Timur	86	16.201.121,00			88	16.201.121,00
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lampung Timur	1 Dokumen	7.847.514,00	APBD		3 Dokumen	7.847.514,00
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lampung Timur	1 Dokumen	8.353.607,00	APBD		4 Dokumen	8.353.607,00
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lampung Timur	86	8.184.018.560,00			88	9.264.888.194,00
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Lampung Timur	45 Org/ Bulan	7.869.830.366,00	APBD		47 Org/ Bulan	8.800.000.000,00
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lampung Timur	1 Dokumen	180.000.000,00	APBD		1 Dokumen	280.400.000,00
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Lampung Timur	2 Dokumen	94.000.000,00	APBD		2 Dokumen	130.000.000,00
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lampung Timur	1 Laporan	9.488.194,00	APBD		1 Laporan	9.488.194,00

[illegible]

5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lampung Timur	86	378.000.000,00			88	378.000.000,00
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	Lampung Timur	4 Laporan	65.000.000,00	APBD		4 Laporan	65.000.000,00
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Lampung Timur	3 Laporan	313.000.000,00	APBD		3 Laporan	313.000.000,00
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lampung Timur	86	399.000.000,00			88	432.000.000,00
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Lampung Timur	22 Unit	284.000.000,00	APBD		22 Unit	347.000.000,00
5	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap yang dipelihara	Lampung Timur	45 Unit	45.000.000,00	APBD		45 Unit	45.000.000,00
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Lampung Timur	2 Unit	70.000.000,00	APBD			40.000.000,00
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator kinerja utama pembangunan daerah yang tercapai (%))	Lampung Timur	73%	1.316.455.136,00			75%	1.211.731.444,00
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun (Dok)	Lampung Timur	2 Dokumen	906.432.218,00			2 Dokumen	997.075.439,80
5	01	02	2.01	1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD	Lampung Timur	1 Dokumen	105.373.052,00	APBD		1 Dokumen	115.910.357,20
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Lampung Timur	1 Dokumen	195.269.763,00	APBD		1 Dokumen	214.796.739,30
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Lampung Timur	1 Berita Acara	56.640.027,00	APBD		1 Berita Acara	62.304.029,70
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Lampung Timur	2 Berita Acara	64.652.411,00	APBD		2 Berita Acara	71.117.652,10
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Lampung Timur	2 Berita Acara	208.332.521,00	APBD		2 Berita Acara	229.165.773,10
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Lampung Timur	24 Usulan	93.941.104,00	APBD		24 Usulan	103.335.214,40

[illegible]

5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan bidang sosial budaya, perekonomian dan praswil	Lampung Timur	70%	2.165.710.272,00			80%	3.469.721.200,00
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Indikator Program Perngkat Daerah yang tercapai bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Lampung Timur	80-90%	737.455.136,00	APBD		85-90%	1.422.012.800,00
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung Timur	6 Dokumen	108.813.792,00	APBD		6 Dokumen	162.219.000,00
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Lampung Timur	6 Perangkat Daerah	41.869.900,00	APBD		6 Perangkat Daerah	65.600.000,00
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Lampung Timur	2 Laporan	59.496.000,00	APBD		2 Laporan	138.328.000,00
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Lampung Timur	1 Laporan	113.309.763,00	APBD		1 Laporan	460.455.000,00
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Lampung Timur	9 Dokumen	159.439.889,00	APBD		9 Dokumen	155.173.000,00
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lampung Timur	9 Perangkat Daerah	26.917.792,00	APBD		9 Perangkat Daerah	66.758.800,00
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lampung Timur	9 Perangkat Daerah	67.558.000,00	APBD		9 Perangkat Daerah	172.379.000,00
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Lampung Timur	1 Laporan	160.050.000,00	APBD		1 Laporan	201.100.000,00

5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai bidang perekonomian dan SDA (%)	Lampung Timur	80-90%	552.000.000,00	APBD		85-90%	920.000.000,00
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Lampung Timur	4 dokumen	72.324.500,00	APBD		4 dokumen	200.000.000,00
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Lampung Timur	4 Perangkat Daerah	15.000.000,00	APBD		4 Perangkat Daerah	35.000.000,00
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Lampung Timur	4 Perangkat Daerah	50.000.000,00	APBD		4 Perangkat Daerah	120.000.000,00
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Lampung Timur	4 laporan	95.348.500,00	APBD		4 laporan	130.000.000,00
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Lampung Timur	2 dokumen	100.000.000,00	APBD		2 dokumen	150.000.000,00
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Lampung Timur	2 Perangkat Daerah	15.000.000,00	APBD		2 Perangkat Daerah	35.000.000,00
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Lampung Timur	2 Perangkat Daerah	50.000.000,00	APBD		2 Perangkat Daerah	120.000.000,00
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Lampung Timur	2 laporan	154.327.000,00	APBD		2 laporan	130.000.000,00
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Indikator Capaian Program Perangkat Daerah yang Tercapai Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Lampung Timur	80%	876.255.136,00			85%	1.127.708.400,00

5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang Infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung Timur	4 Dokumen	136.620.000	APBD		4 Dokumen	198.000.000,00
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Lampung Timur	4 Perangkat Daerah	89.280.000	APBD		4 Perangkat Daerah	102.000.000,00
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Lampung Timur	4 Perangkat Daerah	49.655.136	APBD		4 Perangkat Daerah	102.000.000,00
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Infratruktur	Lampung Timur	4 Laporan	88.400.000	APBD		4 Laporan	108.000.000,00
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang Kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung Timur	4 Dokumen	384.300.000	APBD		4 Dokumen	329.708.400,00
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Lampung Timur	4 Perangkat Daerah	67.500.000	APBD		4 Perangkat Daerah	84.000.000,00
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Lampung Timur	4 Perangkat Daerah	14.500.000	APBD		4 Perangkat Daerah	96.000.000,00
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Kewilayahan	Lampung Timur	4 Laporan	46.000.000	APBD		4 Laporan	108.000.000,00
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				511.172.373,00				696.814.543,60
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	CAKUPAN KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Lampung timur	70%	511.172.373,00	APBD		80%	696.814.543,60
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelengaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase ketersediaan Peneltian dan Pengembangan Penyusunan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan serta Data/Informasi Pembangunan	Lampung timur	70%	274.387.697,00	APBD		80%	540.000.000,00

5	05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan fasilitasi , Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Lampung timur	1 Laporan	52.495.197	APBD		1 laporan	150.000.000
5	05	02	2.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	lampung timur	1 laporan	31.300.000	APBD		1 laporan	175.000.000
5	05	02	2.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi	lampung timur	1 laporan	63.150.000	APBD		1 laporan	65.000.000
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang terkelola dengan Baik	Lampung timur	1 Laporan	127.442.500	APBD		1 laporan	150.000.000
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	lampung timur	70%	94.226.000,00	APBD		80%	175.000.000,00
5	05	02	2.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	lampung timur	1 dokumen	94.226.000	APBD		1 dokumen	175.000.000
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase ketersediaan data, informasi inovasi serta Teknologi Hasil Kelitbangan	lampung timur	70%	142.558.676,00	APBD		80%	156.814.543,60
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	lampung timur	1 dokumen	142.558.676	APBD		1 dokumen	156.814.544
JUMLAH									14.186.323.283,00				16.648.171.046,20



BAB IV PENUTUP

Sebagaimana amanat dan ketentuan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Renstra SKPD.

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur, dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good governance* di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Semoga Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BAPPEDA Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.

Sukadana, 26 Juli 2024

Kepala Bappeda
Kabupaten Lampung Timur



Ir. Agusrina Syaka, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680413200003 1 005



BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

RENCANA KERJA 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana yang di amanatkan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan Tata Cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana–rencana pembangunan baik dalam Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Pendapatan Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan. Renja perubahan Badan Pendapatan Daerah disusun dengan memperhatikan target pencapaian indikator kinerja, dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam periode satu tahun yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renja perubahan diartikan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan tujuan, sasaran, dan program prioritas. Selain itu Renja perubahan juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan yang terjadi baik di tingkat global, nasional, maupun daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur perlu mengambil langkah-langkah dan kebijakan yang responsive terhadap perubahan yang terjadi. Dalam kaitan ini Perencanaan Strategis (Strategic Planning) sangat penting, bahkan tidak dapat dihindari untuk memenuhi perubahan yang terjadi. Perencanaan strategis dapat disebut sebagai metode yang berhubungan dengan kompleksitas lingkungan yang seringkali berkaitan dengan kepentingan organisasi. Juga merupakan suatu Metode untuk menangani kompleksitas lingkungan internal yang di timbulkan oleh bermacam-macam kebutuhan dari Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Renja perubahan memiliki beberapa fungsi antara lain :

- a. Mengukur kinerja pelayanan SKPD
- b. Menjadi pedoman untuk menyusun program dan kegiatan tahunan perubahan OPD
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

Penyusunan Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah berpedoman pada :

- a. Rancangan Perubahan OPD
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat daerah Kabupaten/Kota sampai dengan triwulan II tahun berjalan

1.2. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008, tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perubahan

Maksud Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam melaksanakan program kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perubahan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 adalah :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Badan Pendapatan daerah Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Renstra dan hasil Musrenbang RKPD untuk melaksanakan fungsi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan
3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dalam penganggaran tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan Pembangunan.
5. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur serta indikator kinerjanya yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program satu tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun berjalan

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV. Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Demikian juga halnya dengan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Bapenda yang tertuang dalam Renstra 2025-2029

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahunan (%)	6,71	10	10	11	15	17	18

2.2. CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Target Rp. 280.046.453.121,- realisasi sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 123.675.783.193,44 atau sebesar 44,16 %

1. Pajak Daerah Target Rp. 152.870.000.000 terealisasi sampai dengan 30 Juni sebesar 64.300.720.850 atau sebesar 42,06 %

Pajak daerah terdiri dari :

1. Pajak reklame target Rp. 1.400.000.000 terealisasi Rp. 875.655.259 atau sebesar 62,55 %
 2. Pajak air tanah target Rp. 1.000.000.000 terealisasi Rp. 589.041.614 atau sebesar 58,90 %
 3. Pajak mineral bukan logam dan batuan (batu belah) target Rp. 5.500.000.000 terealisasi Rp. 275.490.000 atau sebesar 5,01 %
 4. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) target Rp. 25.000.000.000 terealisasi Rp. 11.970.184.581 atau sebesar 47,88 %
 5. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) target Rp. 5.000.000.000 terealisasi Rp. 2.256.138.525 atau sebesar 45,12 %
 6. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Rp. 49.970.000.000 terealisasi Rp. 22.459.255.381 atau sebesar 44,95 %
 7. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp. 38.104.023.722 terealisasi Rp. 15.631.277.424 atau sebesar 41,02 %
 8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp. 26.895.976.278 terealisasi Rp. 10.243.678.066 atau sebesar 38,09 %
2. Retribusi daerah target Rp. 110.201.453.121 terealisasi Rp. 41.418.039.562 atau 37,58 %

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan target Rp. 6.500.000.000 terealisasi Rp. 1.064.875.474,69 atau 16,38 %
4. Lain lain pendapatan asli daerah yang sah target Rp. 10.475.000.000 terealisasi Rp. 16.892.147.306,75 atau 161,26 %
5. Pendapatan transfer target Rp. 2.133.409.155.221 terealisasi Rp. 919.789.444.841 atau 43,11 %

Adapun realisasi anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Anggaran Belanja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Anggaran Tahun 2025	Realisasai		
			Fisik (%)	Keuangan	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.858.449.397	57	3.372.627.808	26,20
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.123.476.376	57	759.540.584	15,95
	Jumlah	20.981.925.773			

Kinerja program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah yang terdiri dari 2 program, 9 kegiatan dan 57 sub kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 4.132.168.392 dari target sebesar Rp. 20.981.925.773 atau (22,65 %), sedangkan realisasi fisik sebesar 57%. Jauhnya perbedaan perkembangan realisasi fisik dan keuangan disebabkan administrasi keuangan yang belum diselesaikan dan pemberian UP yang belum memadai. Seluruh program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah telah mendukung sasaran kinerja pada indikator tujuan/sasaran pada Renstra perangkat daerah.

Berikut tabel Program dan kegiatan yang berkaitan dengan sasaran Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran Triwulan II

No./ Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR	Penyediaan Dana	Realisasi Penyerapan Dana		Pelaksanaan Fisik	
		Jumlah	Jumlah	(%)	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)
	Belanja Tidak Langsung	10.160.990.803	2.881.276.972	28,36	40	100,00
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.160.990.803	2.881.276.972	28,36	40	100,00
	Belanja Langsung	10.820.934.970,00	1.239.463.970,00	11,56		
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.697.458.594	479.923.386	13,29		
5.02.01.2.01	I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.849.824	14.088.600	24,35		
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.847.514	5.633.971	71,79	1	50,00
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.379.027	-	0,00	0	-
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.106.855	-	0,00	0	-
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.975.342	-	0,00	0	-
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	-	0,00	0	-
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.187.479	5.016.029	61,26	1	33,33

No./ Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR	Penyediaan Dana	Realisasi Penyerapan Dana		Pelaksanaan Fisik	
		Jumlah	Jumlah	(%)	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.353.607	3.438.600	41,16	1	100,00
5.02.01.2.02	II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	465.761.329	148.107.769	31,80		
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	213.162.518	57.347.289	26,90	1	100,00
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	181.898.373	58.865.343	32,36	1	100,00
5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15.503.119	6.276.715	40,49	1	100,00
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.488.194	7.647.975	80,61	0	-
5.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	26.919.070	8.682.982	32,26	0	-
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.790.055	4.742.273	34,39	0	-
5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	4.545.192	90,90	0	-
5.02.01.2.03	III. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	55.769.005	8.357.647	14,99		
5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.500.000	-	0,00	0	-
5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	#DIV/0!	1	100,00
5.02.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	15.407.368	5.609.447	36,41	0	-
5.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.906.802	-	0,00	0	-
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.954.835	2.748.200	13,11	0	-
5.02.01.2.05	IV. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74.775.856	-	0,00		

No./ Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR	Penyediaan Dana	Realisasi Penyerapan Dana		Pelaksanaan Fisik	
		Jumlah	Jumlah	(%)	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	#DIV/0!	0	-
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	74.775.856	-	0,00	0	-
5.02.01.2.06	V. Administrasi Umum Perangkat Daerah	337.900.036	98.644.440	29,19		
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	11.221.440	44,89	1	100,00
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.250.000	21.133.235	42,06	1	33,33
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.845.022	13.161.048	49,03	0	-
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.647.866	6.050.000	51,94	1	100,00
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.469.473	17.878.437	34,07	0	-
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	427.200	-	0,00	0	-
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.000.000	8.874.280	55,46	1	100,00
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.260.475	20.326.000	13,09	0	-
5.02.01.2.07	VI. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	872.798.455	-	0,00		
5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	126.500.000	-	0,00	1	100,00
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	462.770.000	-	0,00	5	100,00
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	132.268.890	-	0,00	0	-
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	146.695.365	-	0,00	0	-
5.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.564.200	-	0,00	0	-
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	#DIV/0!	0	#DIV/0!

No./ Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR	Penyediaan Dana	Realisasi Penyerapan Dana		Pelaksanaan Fisik	
		Jumlah	Jumlah	(%)	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)
5.02.01.2.08	VII. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.358.510.053	113.600.668	8,36		
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.745.186	4.170.400	53,85	0	-
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	329.949.697	105.802.131	32,07	1	100,00
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.020.815.170	3.628.137	0,36	1	100,00
5.02.01.2.09	VIII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	474.094.036	97.124.262	22,90		
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.610.958	13.353.950	33,71	1	100,00
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	174.732.829	56.140.312	32,13	6	100,00
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.136.687	27.630.000	99,98	10	11,36
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120.577.758	-	9,48	0	-
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.035.804	-	0,00	0	-
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7.123.476.376	759.540.584	10,66		
5.02.04.02.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	7.123.476.376	759.540.584	10,66		
5.02.04.02.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	32.666.237	12.931.409	39,59	0	-
5.02.04.02.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	173.661.390	28.394.869	16,35	1	12,50

No./ Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR	Penyediaan Dana	Realisasi Penyerapan Dana		Pelaksanaan Fisik	
		Jumlah	Jumlah	(%)	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)
5.02.04.02.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	548.276.807	76.030.455	13,87	0	-
5.02.04.02.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	715.885.134	-	0,00	1	100,00
5.02.04.02.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	830.128.748	53.295.190	6,42	1	100,00
5.02.04.02.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.387.541.843	89.822.694	6,47	0	-
5.02.04.02.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	200.954.069	57.520.430	28,62	100	2,00
5.02.04.02.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	570.118.892	82.317.137	14,44	0	-
5.02.04.02.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	191.277.091	31.164.249	16,29	4	100,00
5.02.04.02.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	442.806.408	77.341.676	17,47	0	-
5.02.04.02.01.11	Penagihan Pajak Daerah	1.005.761.909	64.250.396	6,39	0	-
5.02.04.02.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	224.529.010	36.325.390	16,18	0	-
5.02.04.02.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	492.943.943	92.798.305	18,83	0	-
5.02.04.02.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	263.189.537	42.081.974	15,99	0	-
5.02.04.02.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	43.735.358	15.266.410	34,91	0	-
JUMLAH TOTAL		20.981.925.773	4.120.740.942	19,69		

2.3. Isu Penting Dalam Menjalankan Tugas Pokok OPD

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan lainnya serta pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangan daerah/Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan Daerah
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, antara lain :

- a. Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah
- b. Database potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang belum sempurna
- c. Pemahaman oleh sebagian masyarakat bahwa membayar pajak daerah masih dianggap sebagai beban dan belum dianggap kewajiban.
- d. Kepatuhan, ketaatan dan kejujuran wajib pajak relatif masih kurang
- e. Terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan pajak
- f. Data tunggakan pajak masih besar

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur melakukan perubahan anggaran baik pergeseran

antar sub kegiatan maupun perubahan jumlah pagu antar sub kegiatan karena adanya penambahan anggaran pada beberapa sub kegiatan seperti :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
7. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
8. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
9. Penetapan Wajib Pajak Daerah
10. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan penganggaran, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2025 telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan diubah lagi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengelola pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur merumuskan program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2025, yaitu :

Adapun program dan kegiatan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kegiatan :
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Kegiatan
 1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.2. Rencana Pendanaan Perangkat Daerah

Rincian rencana Program dan kegiatan untuk Perubahan Tahun 2025 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Berjalan)										
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif		
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=12-11
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERLAKASANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERLAKASANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	12 bulan	12 bulan	31.774.915.069	34.075.395.243	2.300.480.174
5	02	01	2.01		Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Terselenggaranya tertib perencanaan penganggaran dan laporan evaluasi SKPD	Terselenggaranya tertib perencanaan penganggaran dan laporan evaluasi SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	12 bulan	12 bulan	62.849.824	62.849.824	-
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	2 Dok	2 Dok	7.847.514	7.847.514	
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	8.379.027	8.379.027	
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	8.106.855	8.106.855	

5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	6.975.342	6.975.342	
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	15.000.000	15.000.000	
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	3 Lap	3 Lap	8.187.479	8.187.479	
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Lap	1 Lap	8.353.607	8.353.607	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	100 Persen	100 Persen	7.900.465.136	9.363.966.639	1.463.501.503
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	7.355.984.766	8.819.486.269	1.463.501.503
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	261.845.376	261.845.376	
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	203.146.800	203.146.800	
5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	20.000.000	20.000.000	
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Lap	1 Lap	9.488.194	9.488.194	
5	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	20.000.000	20.000.000	
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	2 Dok	2 Dok	15.000.000	15.000.000	

5	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	15.000.000	15.000.000	
5	02	01	2.03		<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Tertib administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Tertib administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>BAPENDA</i>	<i>BAPENDA</i>	<i>Lampung Timur</i>	<i>Lampung Timur</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>108.710.000</i>	<i>108.710.000</i>	<i>-</i>
5	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	10.000.000	10.000.000	
5	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	20.000.000	20.000.000	
5	02	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Lap	1 Lap	27.600.000	27.600.000	
5	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Lap	1 Lap	15.000.000	15.000.000	
5	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Lap	1 Lap	36.110.000	36.110.000	
5	02	01	2.05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Presentase Sasaran Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Presentase Sasaran Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>BAPENDA</i>	<i>BAPENDA</i>	<i>Lampung Timur</i>	<i>Lampung Timur</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>203.947.962</i>	<i>203.947.962</i>	<i>-</i>
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	121 Paket	121 Paket	55.642.880	55.642.880	
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	5 Orang	5 Orang	148.305.082	148.305.082	
5	02	01	2.06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>BAPENDA</i>	<i>BAPENDA</i>	<i>Lampung Timur</i>	<i>Lampung Timur</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>443.391.451</i>	<i>443.941.451</i>	<i>550.000</i>
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	4 Paket	4 Paket	32.798.103	32.798.103	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	3 Paket	3 Paket	78.636.726	78.636.726	
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	4 Paket	4 Paket	11.066.132	11.616.132	550.000

5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	5 Paket	5 Paket	14.307.332	14.307.332	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	2 Paket	2 Paket	51.490.187	51.490.187	
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	7.112.971	7.112.971	
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Perundang-undangan dalam 12 Bulan	Perundang-undangan dalam 12 Bulan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Lap	1 Lap	20.000.000	20.000.000	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Lap	1 Lap	227.980.000	227.980.000	
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sasaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sasaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	12 Bulan	12 Bulan	846.344.846	1.159.619.266	313.274.420
5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Unit	1 Unit	125.052.345	125.052.345	
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Unit	1 Unit	460.540.000	460.540.000	
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Lapangan yang dsediakan	Lapangan yang dsediakan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	32 Unit	32 Unit		-	
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	17 Unit	17 Unit	155.437.501	155.437.501	
5	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan mesin yang disediakan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Unit	1 Unit		313.274.420	313.274.420
5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Unit	1 Unit	105.315.000	105.315.000	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sasaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sasaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	12 bulan	12 bulan	21.909.346.544	22.322.500.795	413.154.251
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Laporan	1 Laporan	7.745.186	7.745.186	

5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Laporan	1 Laporan	20.282.359.513	20.282.359.513	
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Laporan	1 Laporan	1.619.241.845	2.032.396.096	413.154.251
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase sasaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase sasaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	12 bulan	12 bulan	299.859.306	409.859.306	110.000.000
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	5 Unit	5 Unit	36.024.345	36.024.345	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	2 Unit	2 Unit	185.410.307	185.410.307	
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	30 Unit	30 Unit	58.143.374	168.143.374	110.000.000
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dipelihara/direhabilitasi	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	3 Unit	3 Unit	20.281.280	20.281.280	
5	02	04			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pencapaian Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pencapaian Pengelolaan pendapatan Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	12 Bulan	12 Bulan	5.097.571.279	5.490.571.279	393.000.000
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pencapaian Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pencapaian Pengelolaan pendapatan Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	12 Bulan	12 Bulan	5.097.571.279	5.490.571.279	393.000.000
5	02	04	2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	36.076.251	36.076.251	
5	02	04	2.01	02	Analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	8 Dok	8 Dok	227.531.300	302.531.300	75.000.000

5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Lap	1 Lap	385.726.312	585.726.312	200.000.000
5	02	04	2.01	04	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Unit	1 Unit	175.000.000	175.000.000	
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Subjek Pajak adan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Subjek Pajak adan Wajib Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Lap	1 Lap	256.783.361	256.783.361	
5	02	04	2.01	06	Pengolahan pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Lap	1 Lap	1.160.099.005	1.178.099.005	18.000.000
5	02	04	2.01	07	Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	OP	OP	200.000.000	200.000.000	
5	02	04	2.01	08	Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	425.135.800	475.135.800	50.000.000
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	Layanan	Layanan	196.400.000	246.400.000	50.000.000
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	10 Dok	10 Dok	246.967.935	246.967.935	
5	02	04	2.01	11	Penagihan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	1.038.800.400	1.038.800.400	
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian keberatan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	209.274.300	209.274.300	
5	02	04	2.01	13	Pengendalian pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	206.164.587	206.164.587	
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Lap	1 Lap	281.019.684	281.019.684	

5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Lap	1 Lap	52.592.344	52.592.344	
JUMLAH														36.872.486.348	39.565.966.522	2.693.480.174

BAB IV PENUTUP

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka rencana kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2025 ini dapat disusun.

Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 ini diharapkan nantinya dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2026. Renja ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 diucapkan terima kasih dan semoga upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur di tahun tersebut dapat berjalan lebih terarah dan terukur.

Selanjutnya Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten :Lampung timur tahun 2025 ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya apabila dilaksanakan dengan dedikasi dan kerja keras, terutama semua aparatur di lingkungan Badan Pendapatan daerah Kabupaten Lampung Timur.

Akhirnya kepada Tuhan Yang Maha Esa kita berserah diri, semoga segala usaha yang dirintis untuk mencapai kondisi ideal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung timur sebagaimana diharapkan dapat diwujudkan harapannya, Amin..

Sukadana, Juli 2025
KEPALA BADAN PENDAPATA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

AGUS FIRMANSYAH LUKMAN, S.E., M.M
Pembina Tk. I /IV.b
NIP. 19830829 200501 1 004

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KAB. LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH							9.310.856.139,00	9.805.319.493,00	8.365.487.921,00	-945.368.218,00						10.891.780.758,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							9.310.856.139,00	9.805.319.493,00	8.365.487.921,00	-945.368.218,00							10.891.780.758,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN							8.468.165.691,00	8.893.795.045,00	8.323.044.070,00	-145.121.621,00							9.949.090.310,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase kualitas pelayanan intern OPD				100 %	100 %	6.873.083.765,00	7.225.300.569,00	6.714.174.199,00	235.924.614,00							7.109.008.379,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan				5 laporan	5 laporan	47.849.824,00	47.849.824,00	46.769.824,00	-1.080.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH		53.849.824,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	7.847.514,00	7.847.514,00	7.847.514,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			8.847.514,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.379.027,00	8.379.027,00	8.379.027,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			9.379.027,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.106.855,00	8.106.855,00	8.106.855,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			9.106.855,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.975.342,00	6.975.342,00	5.895.342,00	-1.080.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			7.975.342,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	8 Laporan	8.187.479,00	8.187.479,00	8.187.479,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			9.187.479,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	8.353.607,00	8.353.607,00	8.353.607,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			9.353.607,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan				1 laporan	1 laporan	5.273.520.103,00	5.523.719.457,00	5.223.684.976,00	-49.835.127,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH		5.345.520.103,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/b ulan	37 Orang/b ulan	4.878.889.392,00	5.128.346.246,00	4.938.000.876,00	59.111.484,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			4.928.889.392,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	156.561.585,00	163.184.085,00	50.684.085,00	-105.877.500,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			166.561.585,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	215.707.308,00	209.827.308,00	212.638.197,00	-3.069.111,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			225.707.308,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.488.194,00	9.488.194,00	9.488.194,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			10.488.194,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	12.873.624,00	12.873.624,00	12.873.624,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			13.873.624,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah laporan				3 laporan	3 laporan	22.761.626,00	22.761.626,00	22.761.626,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH		24.761.626,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10.929.842,00	10.929.842,00	10.929.842,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			11.929.842,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	11.831.784,00	11.831.784,00	11.831.784,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			12.831.784,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah laporan				4 laporan	4 laporan	598.600.807,00	669.792.484,00	493.324.298,59	-105.276.508,41			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH		638.525.421,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	16.393.368,00	16.393.368,00	16.393.368,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			17.393.368,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	3 Paket	154.148.819,00	287.388.350,00	107.072.069,00	-47.076.750,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			164.686.583,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	43.309.528,00	43.309.528,00	20.232.326,59	-23.077.201,41	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			44.309.528,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	17.311.538,00	6.105.600,00	6.105.600,00	-11.205.938,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			18.311.538,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	32.037.125,00	35.414.359,00	33.467.656,00	1.430.531,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			33.037.125,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	0 Dokumen	27.720.000,00	0,00	0,00	-27.720.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	300.963.150,00	274.464.000,00	303.336.000,00	2.372.850,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			353.070.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				-	0 0	6.717.279,00	6.717.279,00	6.717.279,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			7.717.279,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah unit				1 unit	1 unit	130.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH		140.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	130.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			140.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan				2 laporan	2 laporan	455.397.905,00	455.125.678,00	437.123.074,41	-18.274.830,59			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH		465.397.905,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	115.245.440,00	115.070.413,00	97.067.809,00	-18.177.631,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			120.245.440,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	340.152.465,00	340.055.265,00	340.055.265,41	-97.199,59	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			345.152.465,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	344.953.500,00	366.051.500,00	350.510.400,00	5.556.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH		440.953.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	278.490.000,00	266.116.600,00	258.716.600,00	-19.773.400,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			288.490.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	42.463.500,00	49.934.900,00	41.931.800,00	-531.700,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			52.463.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	24.000.000,00	50.000.000,00	49.862.000,00	25.862.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase disiplin ASN Persentase kinerja ASN Tingkat kualitas pengadaan ASN				88 90 98 % % %	88 90 98 % % %	1.595.081.926,00	1.668.494.476,00	1.608.869.871,00	1.245.000.005,00							2.840.081.931,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	<i>cakupan jumlah dokumen pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian</i>				76 %	76 %	358.132.473,00	431.545.023,00	557.038.625,00	198.906.152,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	ASN KAB. LAMPUNG TIMUR		533.134.973,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	31.320.600,00	31.320.600,00	22.054.600,00	-9.266.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			41.320.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			<i>Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK</i>				8 Dokumen	8 Dokumen	149.997.500,00	149.997.500,00	427.473.426,00	277.475.926,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			275.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian</i>				550 Dokumen	550 Dokumen	59.778.147,00	59.778.147,00	38.206.177,00	-21.571.970,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			69.778.147,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	47.906.900,00	121.319.450,00	32.985.064,00	-14.921.836,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			57.906.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian</i>				-	0 0	36.842.326,00	36.842.326,00	27.830.714,00	-9.011.612,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			46.842.326,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				12 Laporan	12 Laporan	32.287.000,00	32.287.000,00	8.488.644,00	-23.798.356,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			42.287.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	<i>Cakupan Jumlah Dokumen Mutasi dan Promosi ASN</i>				78 %	78 %	799.974.158,00	799.974.158,00	792.995.412,00	-6.978.746,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	ASN KAB. LAMPUNG TIMUR		1.076.290.263,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah</i>				135 Dokumen	135 Dokumen	61.345.225,00	61.345.225,00	22.614.769,00	-38.730.456,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			71.345.225,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			<i>Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN</i>				1450 Dokumen	1450 Dokumen	94.560.533,00	94.560.533,00	35.421.143,00	-59.139.390,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			104.560.533,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN</i>				5 Dokumen	1 Dokumen	644.068.400,00	644.068.400,00	734.959.500,00	90.891.100,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			900.384.505,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	<i>Cakupan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengembangan kompetensi</i>				-	81 %	271.460.929,00	271.460.929,00	154.722.059,00	-116.738.870,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	ASN KAB. LAMPUNG TIMUR		1.025.142.329,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				80 Orang	80 Orang	68.028.400,00	68.028.400,00	38.111.977,00	-29.916.423,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			768.028.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	1 Dokumen	72.113.929,00	72.113.929,00	27.493.782,00	-44.620.147,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			82.113.929,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																		
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				120 Orang	120 Orang	131.318.600,00	131.318.600,00	89.116.300,00	-42.202.300,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			175.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen				670 dokumen	670 dokumen	165.514.366,00	165.514.366,00	104.113.775,00	-61.400.591,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	ASN KAB. LAMPUNG TIMUR		205.514.366,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				12 Dokumen	12 Dokumen	73.246.900,00	73.246.900,00	31.143.100,00	-42.103.800,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			83.246.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				350 Orang	350 Orang	46.173.852,00	46.173.852,00	28.786.453,00	-17.387.399,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			56.173.852,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				10 Laporan	10 Laporan	34.809.400,00	34.809.400,00	38.902.980,00	4.093.580,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			44.809.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				5 Dokumen	5 Dokumen	11.284.214,00	11.284.214,00	5.281.242,00	-6.002.972,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			21.284.214,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							842.690.448,00	911.524.448,00	42.443.851,00	-800.246.597,00							942.690.448,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-				-	-	842.690.448,00	911.524.448,00	42.443.851,00	100.000.000,00							942.690.448,00	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	325 dokumen	842.690.448,00	911.524.448,00	42.443.851,00	-800.246.597,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	ASN KAB. LAMPUNG TIMUR		942.690.448,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				109 Laporan	1 Laporan	842.690.448,00	911.524.448,00	42.443.851,00	-800.246.597,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			942.690.448,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
		J U M L A H							9.310.856.139,00	9.805.319.493,00	8.365.487.921,00	-945.368.218,00						10.891.780.758,00		